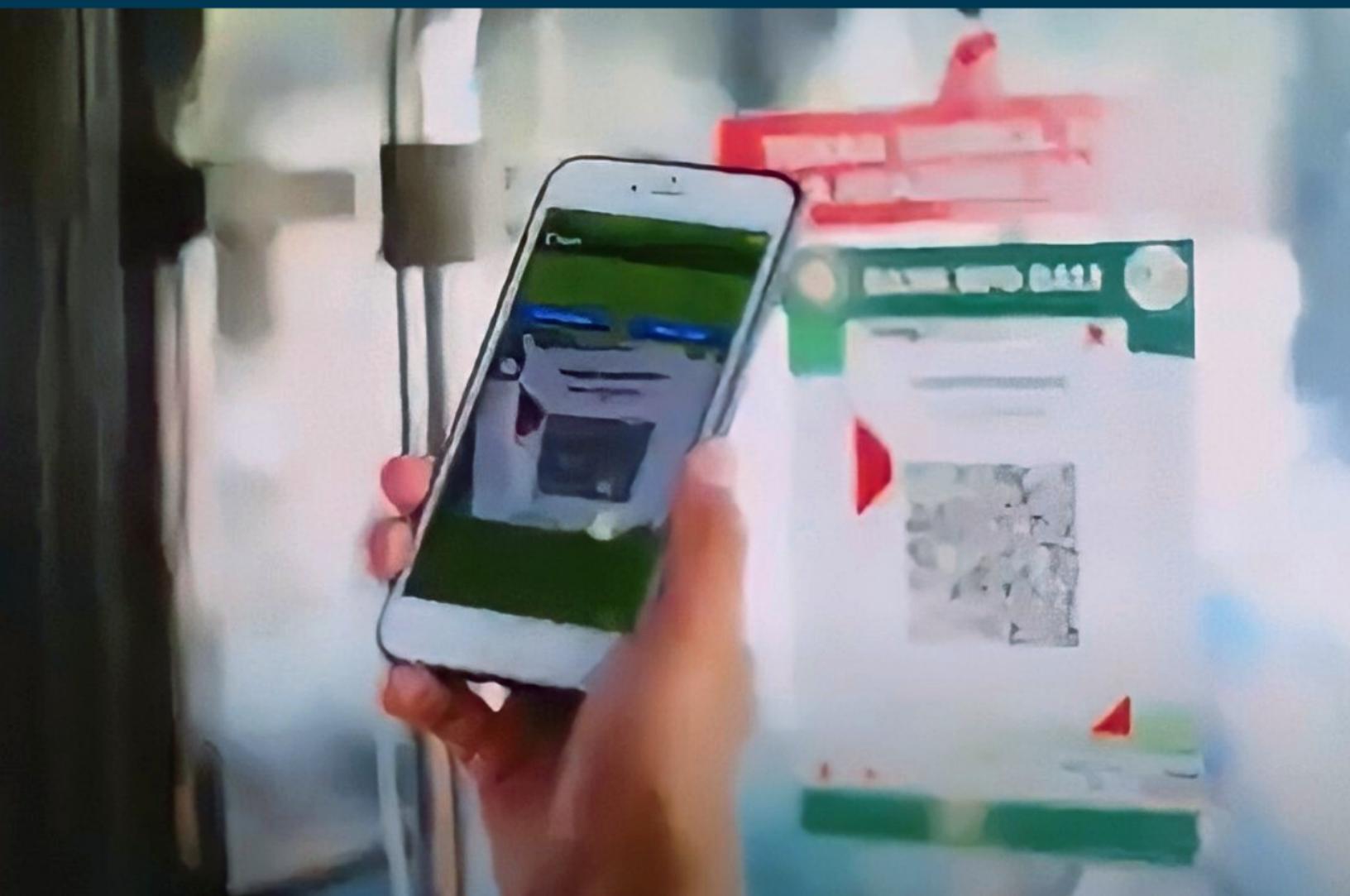


# Laporan Perkembangan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

---



## DAFTAR ISI

<b>1. KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>2. RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>2</b>
<b>3. BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI .....</b>	<b>4</b>
3.1. Perkembangan Ekonomi Terkini .....	4
3.2. Perkembangan Digitalisasi Pembayaran .....	6
3.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
<b>4. BAB II PERKEMBANGAN ETPD NASIONAL .....</b>	<b>10</b>
4.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD Nasional .....	10
4.2. Perkembangan Indeks ETPD – Nasional .....	11
4.3. Implementasi ETPD Semester II Tahun 2021 – Nasional.....	12
<b>5. BAB III PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA REGIONAL .....</b>	<b>16</b>
5.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD di Daerah (Per Tingkat Pemerintah Daerah) ..	16
5.2. Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah .....	17
5.3. Implementasi IETPD Semester II Tahun 2021.....	19
5.4. Implementasi ETP Berdasarkan Regional .....	24
5.4.1. Sumatera.....	24
5.4.2. Jawa .....	25
5.4.3. Kalimantan .....	26
5.4.4. Balinusra.....	28
5.4.5. Sulampua .....	29
<b>6. BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>31</b>
6.1. Kendala Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ..	31
6.2. Rekomendasi Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.....	33

# 1. KATA PENGANTAR

Perekonomian global menuju pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Meski pandemi Covid-19 kembali mengancam dengan munculnya varian delta pada awal 2021, akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas masyarakat turut berdampak pada tingkat perbaikan ekonomi global maupun nasional. Realisasi PAD pada tahun 2021 meningkat 12,13% dibandingkan realisasi PAD tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp296 triliun. Upaya mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kontributor utama dalam PAD ditengah menurunnya perekonomian secara nasional.

Dalam upaya mendorong ETPD, pada tanggal 4 Maret 2021 telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 terkait Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di daerah. Koordinasi yang baik antara Satgas P2DD dan TP2DD diperlukan untuk menghasilkan program kerja yang efektif dalam mendorong ETPD. Berdasarkan laporan implementasi ETPD yang disampaikan TP2DD, Satgas P2DD menyusun Laporan Perkembangan Implementasi ETPD secara berkala. Penyusunan laporan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan elektronifikasi pada berbagai transaksi belanja dan pendapatan melalui berbagai kanal pembayaran, penggunaan dan integrasi sistem informasi keuangan di daerah serta aspek lingkungan strategis yang mampu mendorong ETPD. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam penyampaian data implementasi ETPD dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan laporan asesmen ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menyusun berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong ETPD.

## 2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022. Pada triwulan IV 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Perbaikan terjadi di hampir seluruh komponen PDB sisi pengeluaran maupun lapangan usaha, sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07% (yoy).

**Meningkatnya perekonomian nasional pada triwulan IV 2021 mendorong perbaikan pertumbuhan penerimaan daerah.** Realisasi PAD pada tahun 2021 meningkat 12,13% dibandingkan realisasi PAD tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp296 triliun. Realisasi PAD tahun 2021 mencapai 95,4% dari target anggaran yang direncanakan, meningkat dibandingkan capaian 2020 sebesar 80,4% target. Perbaikan realisasi pendapatan daerah ini terutama bersumber dari capaian realisasi pajak daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 mencapai Rp192,2 triliun atau meningkat 7,22% dibanding tahun 2020. Di sisi lain, retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami kontraksi 5,79% (yoy) dengan nilai realisasi sebesar Rp7,9 triliun.

**Implementasi ETPD meningkat didorong penguatan kelembagaan pasca diterbitkan Keppres No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).** Awareness pemerintah daerah untuk mendorong ETPD meningkat tercermin dari meningkatnya jumlah TP2DD yang telah terbentuk. Hingga Desember 2021 pembentukan TP2DD telah mencapai 542 pemerintah daerah yang terdiri atas 34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten. Untuk mendorong pelaporan ETPD oleh Pemda, Ketua Sekertariat Satgas P2DD (Kemenko Perekonomian) telah menyampaikan surat kepada seluruh TP2DD yang meminta Pemda melakukan pelaporan data ETPD melalui SIP2DD. Surat tersebut juga telah disebarluaskan oleh Kemendagri kepada seluruh Pemda melalui *radiogram*.

**Hasil pemetaan Indeks ETPD menunjukkan 191 Pemda telah berada pada tahap Digital, 236 Pemda berada pada tahap Maju, 101 Pemda berada pada tahap Berkembang dan 14 Pemda berada pada tahap Inisiasi.** Capaian dimaksud didorong oleh elektronifikasi di berbagai transaksi pendapatan dan belanja serta penggunaan sistem informasi seperti elektronifikasi transaksi pajak sebesar 87,1%, retribusi 59,7%, Belanja Langsung 93,6% dan Belanja Tidak Langsung 91,6% dari total jenis transaksi pendapatan/belanja yang dipungut atau dianggarkan. Penggunaan kanal pembayaran digital seperti penggunaan QRIS telah diimplementasikan di 243

Pemda, *Internet/Mobile/SMS Banking* di 407 Pemda dan *e-commerce* di 233 Pemda. Pemanfaatan sistem informasi keuangan seperti SP2D *Online* telah diimplementasikan oleh 377 Pemda atau 69,6% dari total 542 Pemda, dan *Cash Management System* (CMS) telah diimplementasikan di 437 Pemda atau 80,6% dari total 542 Pemda.

Ke depan, implementasi ETPD akan terus didorong antara lain melalui perluasan penggunaan kanal pembayaran digital, termasuk mendorong kesiapan BPD untuk bekerjasama dengan bank lain/PJP atau platform digital/*e-commerce*. Di sisi masyarakat, perlu adanya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan literasi dan minat masyarakat untuk bertransaksi nontunai menggunakan kanal digital. Selain itu, peningkatan partisipasi dan keakuriasan pelaporan implementasi ETPD dalam SIP2DD juga perlu dilakukan untuk mendukung asesmen implementasi ETPD yang lebih *robust*.

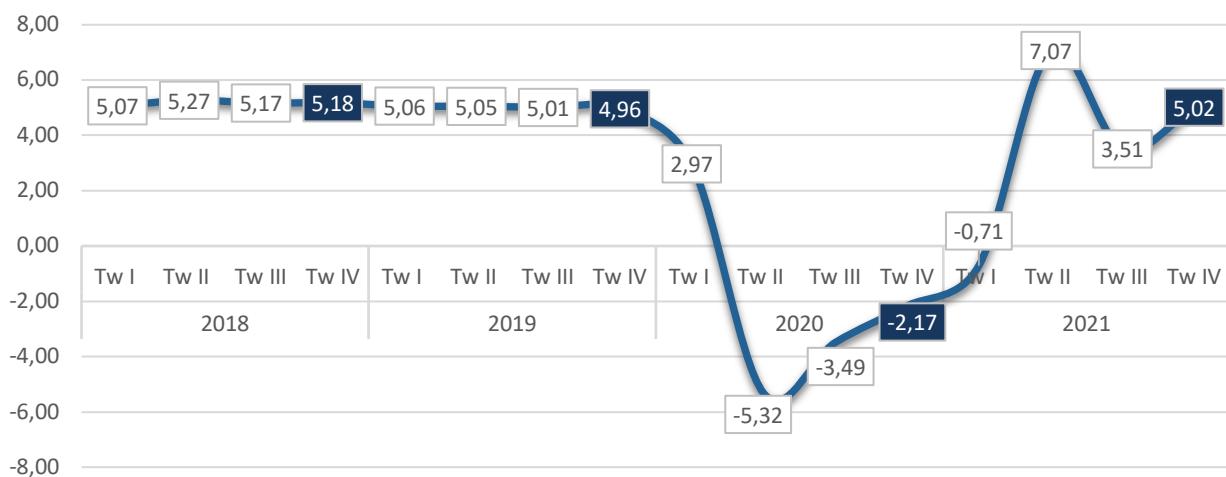
### 3. BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI

#### 3.1. Perkembangan Ekonomi Terkini

Perekonomian global menuju pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Meski pandemi Covid-19 kembali mengancam dengan munculnya varian delta pada awal 2021, akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas masyarakat berkontribusi pada perbaikan ekonomi global maupun nasional. Perbaikan ekonomi global dapat dilihat dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat di dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia (yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat) dan didukung oleh stimulus fiskal dan moneter yang kuat melalui pelaksanaan program vaksinasi, bantuan sosial dan dunia usaha serta penambahan likuiditas ke sistem keuangan. Ekonomi Tiongkok tumbuh 8,1% (yoY) pada tahun 2021 setelah mencatat pertumbuhan 2,3% (yoY) pada tahun 2020. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 6,9% (yoY), setelah mengalami kontraksi 3,4% (yoY) pada tahun 2020.

Ekonomi nasional juga menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2020 dan semakin membaik pada triwulan IV 2021. Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah melalui percepatan program vaksinasi dan pengetatan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Jawa-Bali selama puncak penyebaran varian Delta, telah mendorong pengendalian kasus Covid-19 sehingga jumlah kasus positif menurun dan PPKM dibuka secara bertahap. Grafik 1.1 menunjukkan kinerja perekonomian tumbuh positif sejak triwulan II 2021, yaitu sebesar 7,07% (yoY). Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pada triwulan III, kinerja ekonomi tumbuh positif 1,51% (qtq) pada triwulan IV menjadi 5,02%

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia (% , yoY)



Sumber: BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV ditopang oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh 29,83% (yoj) dan impor barang dan jasa yang tumbuh 29,60% (yoj). Selain itu konsumsi pemerintah pada Q4 juga terpantau tumbuh sebagai dampak pemberian stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

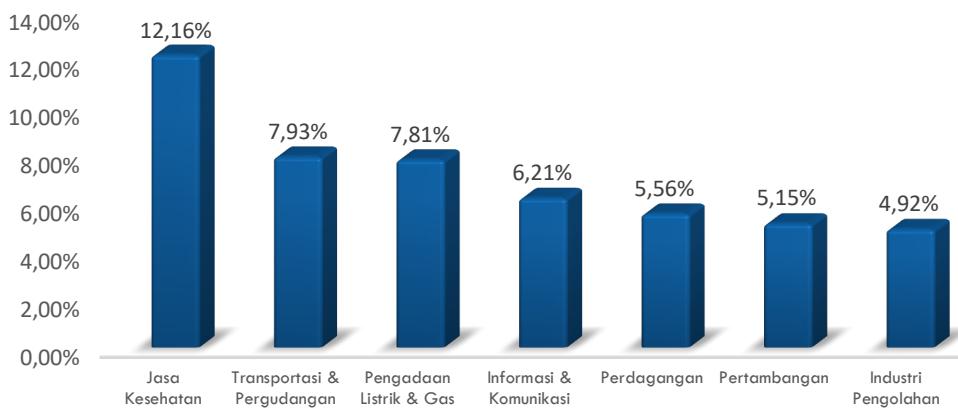
Tabel 1.1 Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen	2020		2021	
	TW III	TW IV	TW III	TW IV
PDB	-3,49	-2,19	3,51	5,02
Konsumsi Rumah Tangga	-4,05	-3,61	1,02	3,55
PMTB		-6,71	3,76	4,49
Eksport	-11,66	-6,89	29,16	29,83
Impor	-23	-15,83	29,95	29,6
Konsumsi Pemerintah	9,76	1,79	0,62	5,25

Sumber: BPS, 2021

Secara sektoral, sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh Jasa Kesehatan, Transportasi Pergudangan, Pengadaan Listrik Gas, Informasi Komunikasi, Perdagangan, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 12,16% (Grafik 1.2). Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan kegiatan jasa kesehatan akibat peningkatan jumlah pasien dan uji spesimen Covid-19, dan Kenaikan insentif Kesehatan terkait perawatan pasien Covid-19.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyumbang Kinerja Ekonomi Triwulan IV - 2021 (% , yoy)



Sumber: BPS, 2021

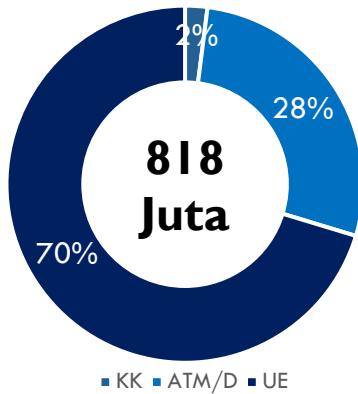
Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2021 dan secara keseluruhan pada tahun 2021 membaik dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi 2,07% (yoj). Perbaikan kinerja didorong oleh pelonggaran mobilitas yang sejalan dengan

perkembangan capaian vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat serta stimulus kebijakan yang terus berlanjut. Pada tahun 2021 pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memfokuskan pada upaya mendorong perluasan vaksinasi Covid-19, insentif fiskal, serta mendorong realisasi bantuan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat. Insentif fiskal melalui keringanan pajak dan retribusi serta penghapusan sanksi administrasi dalam keterlambatan pembayaran cukup efektif mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan 2021, Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan berada dalam rentang 3,2% – 4,0% (yoY). Sementara pada tahun 2022, kinerja ekonomi diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada rentang 4,7% - 5,5% (yoY).

### 3.2. Perkembangan Digitalisasi Pembayaran

Meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring serta perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital turut mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Percepatan digitalisasi sistem pembayaran telah mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Perkembangan instrumen nontunai yang beredar, terutama uang elektronik menunjukkan peningkatan yang tinggi pada akhir periode 2021. Jumlah instrumen non tunai beredar pada periode November mencapai 818 juta instrumen, yang mencakup uang elektronik, kartu ATM/debit dan kartu kredit (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Jumlah Instrumen Nontunai Beredar November 2021



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Instrumen Nontunai Beredar November 2021

2021	UANG ELEKTRONIK	ATM/ DEBIT	KARTU KREDIT
	Nominal	Rp.305,4 Triliun	Rp.7.677,2 Triliun
Growth (yoY)	49,06%	10,99%	2,35%

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Secara nominal, transaksi instrumen nontunai sepanjang 2021 mencapai Rp 8.227 triliun, dengan nominal transaksi terbesar didominasi kartu ATM/Debit. Instrumen pembayaran kartu ATM/debit sepanjang 2021 mencatat pertumbuhan 10.99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara nominal transaksi uang elektronik tumbuh hingga 49,06% (yoY). Nominal kartu kredit mencatat kenaikan sebesar 2.35% (yoY) (Gambar 1.1).

Tren kenaikan transaksi *digital banking* juga mengalami peningkatan, baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Secara keseluruhan tahun 2021 volume transaksi

digital banking yang mencakup *phone banking*, *sms/mobile banking* dan *internet banking* mencapai 6,96 miliar transaksi. Volume transaksi tersebut tumbuh 40,31% dibandingkan tahun 2020, dengan peningkatan volume pada transaksi *sms/mobile banking* dan *internet banking*. Sementara itu, nominal transaksi *digital banking* tumbuh 22,74% dibanding tahun 2020. Tren kenaikan transaksi *digital banking* menunjukan bahwa akseptasi masyarakat terhadap pembayaran secara *digital* mulai meningkat.

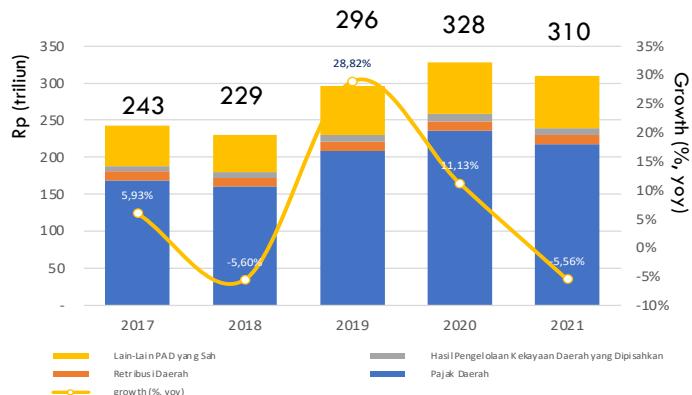
**Tingginya akseptasi masyarakat juga tercermin dari perkembangan transaksi QRIS.** Volume transaksi QRIS pada triwulan IV 2021 tumbuh hingga 236% (yoY) dan mencapai 143,2 juta transaksi. Sementara dari sisi nominal, transaksi melalui kanal QRIS tumbuh 269% (yoY) dengan nominal Rp11,1 triliun pada triwulan IV 2021. Perluasan QRIS yang ditempuh melalui kampanye masif terus dilakukan untuk mencapai target penggunaan QRIS di 12 juta *merchant* pada tahun 2021. Selain itu sinergi dengan Pemerintah bersama Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus didorong untuk meningkatkan penggunaan QRIS dalam transaksi pendapatan pemerintah.

Berbagai perkembangan transaksi pembayaran nontunai dan digital tidak hanya mencerminkan akseptasi masyarakat, namun menjadi peluang untuk **mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Pembatasan mobilitas masyarakat pada masa pandemi serta besarnya target anggaran PAD yang dikelola Pemerintah Daerah berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pencapaian target PAD akibat adanya kendala pembayaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, elektronifikasi dan pemanfaatan kanal pembayaran digital dapat menjadi peluang untuk mendorong optimalisasi PAD melalui kemudahan pembayaran yang diberikan kepada masyarakat.

### 3.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kondisi pandemi Covid-19 dan tidak optimalnya capaian realisasi penerimaan daerah pada tahun 2020 menyebabkan Pemerintah Daerah menurunkan target anggaran penerimaan pada tahun 2021. Pembatasan aktivitas sosial, menurunnya usaha dan transaksi kena pajak, serta sejumlah insentif perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah telah mengurangi potensi penerimaan daerah pada tahun 2020. Dari sisi target anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2021 mengalami penurunan 5,6% menjadi Rp310,17 triliun (Grafik 1.4). Target PAD yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah juga mencatat penurunan masing-masing sebesar 7,6% dan 6,6% dibanding rencana 2020. Penurunan anggaran pada tahun 2021 juga sejalan dengan tidak optimalnya realisasi PAD pada tahun 2020 yang hanya mencapai 80,4% dari target sebesar Rp328,42 triliun.

Grafik 1.4. Anggaran PAD Tahun 2021 (data sementara)



Sumber: DJPK, 2021

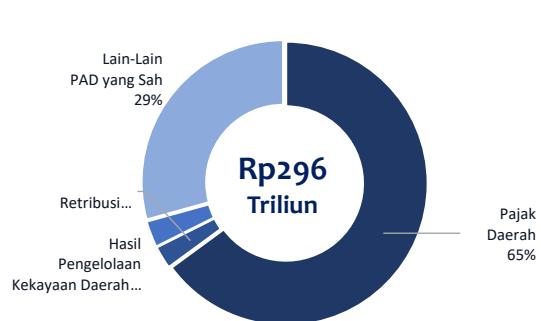
Meski demikian, perbaikan kinerja ekonomi nasional pada tahun 2021 turut mendorong perbaikan pertumbuhan penerimaan daerah. Realisasi PAD pada tahun 2021 meningkat 12,13% dibandingkan realisasi PAD tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp296 triliun (Grafik 1.5.). Realisasi PAD tahun 2021 mencapai 95,4% dari target anggaran yang direncanakan, meningkat dibandingkan capaian 2020 sebesar 80,4% target. Kondisi ini juga mengkonfirmasi arah pemulihan ekonomi nasional setelah pada tahun 2020 realisasi PAD mencatat kontraksi sebesar 10,10% (yoY) seiring dengan menurunnya realisasi pajak daerah.

Grafik 1.5. Realisasi PAD Tahun 2021



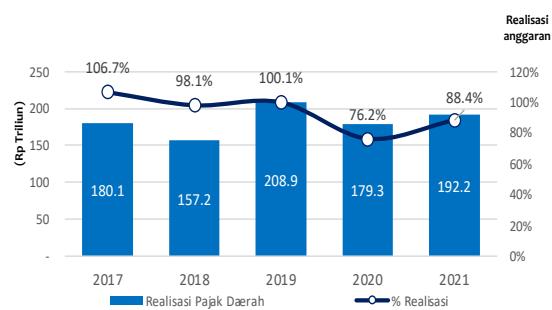
Sumber: DJPK, 2021

Grafik 1.6. Komposisi PAD Tahun 2021

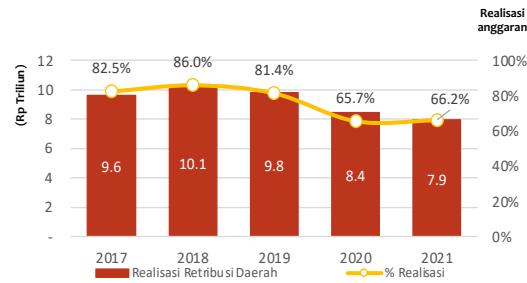


Perbaikan realisasi pendapatan daerah ini terutama bersumber dari capaian realisasi pajak daerah. Pendapatan dari pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam komponen realisasi PAD (Grafik 1.6.). Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 mencapai Rp192,2 triliun atau meningkat 7,22% dibanding tahun 2020 (Grafik 1.7.). Realisasi tersebut mencapai 88,4% dari target pajak daerah yang dianggarkan sebesar Rp217,5 triliun. Capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2021 juga lebih tinggi dibandingkan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang hanya mencapai 76,2% dari target.

Grafik 1.7. Realisasi Pajak Daerah (Rp triliun)



Grafik 1.8. Realisasi Retribusi Daerah (Rp triliun)



Sumber: DJPK, 2021

Di samping perbaikan ekonomi, berbagai kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemerintah Daerah turut mendorong peningkatan realisasi pajak daerah. Beberapa relaksasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah antara lain diberikan dalam bentuk pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif atas piutang pajak daerah serta pemberian penghapusan sanksi administratif untuk pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak daerah lainnya. Relaksasi yang dikeluarkan berbagai Pemerintah Daerah tersebut tidak hanya meringankan beban finansial bagi masyarakat, namun mendorong masyarakat memanfaatkan stimulus yang diberikan hingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah di masa pandemi Covid-19.

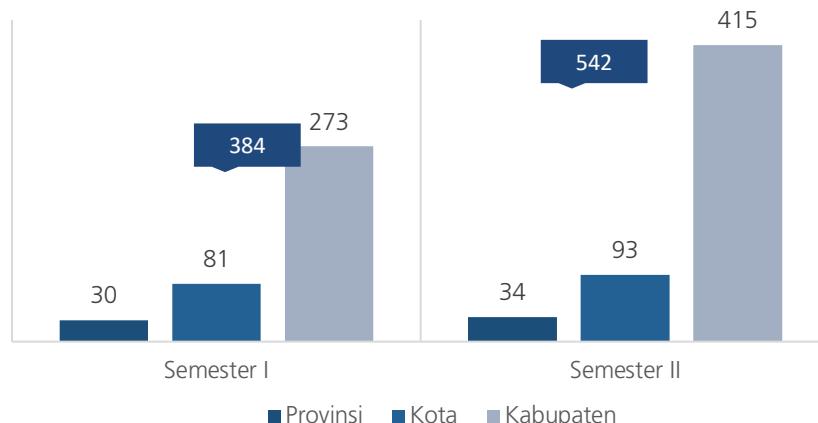
Di sisi lain, pendapatan daerah dari retribusi masih menunjukkan penurunan capaian realisasi. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami kontraksi 5,79% (yoY) dengan nilai realisasi sebesar Rp7,9 triliun (Grafik 1.8.). Kondisi kontraksi ini telah diperkirakan sebelumnya, sejalan dengan penyesuaian ditargetkan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp11,98 triliun atau turun 6,56% dibanding target anggaran retribusi daerah pada tahun 2020. Dari anggaran 2021 tersebut, realisasi retribusi daerah hanya mencapai 66,19% target. Meski demikian, kondisi kontraksi realisasi retribusi daerah tidak sedalam penurunan retribusi pada tahun 2020 yang tercatat mengalami kontraksi hingga 14,02% (yoY), dengan capaian realisasi Rp8,4 triliun.

## 4. BAB II PERKEMBANGAN ETPD NASIONAL

### 4.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD Nasional

Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, pembentukan TP2DD terus mengalami peningkatan. Pada semester II 2021, TP2DD telah terbentuk di 542 pemerintah daerah atau 100% dari total seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, saat ini telah terbentuk 34 TP2DD di tingkat provinsi, 93 TP2DD di tingkat kota, dan 415 TP2DD di tingkat kabupaten.

Grafik 2.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD



Sumber: Bank Indonesia

Akselerasi pembentukan TP2DD tersebut juga didukung oleh Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda antara Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu dan Kominfo pada 13 Februari 2020 sebagai cikal bakal TP2DD. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan terintegrasi. Tugas TP2DD, yaitu menyusun peta jalan dan rencana aksi, melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD, melaksanakan ETPD, melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD, melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD, dan melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

Gambar 2.1. Penandatanganan Nota Kesepahaman ETP



Sumber: Bank Indonesia

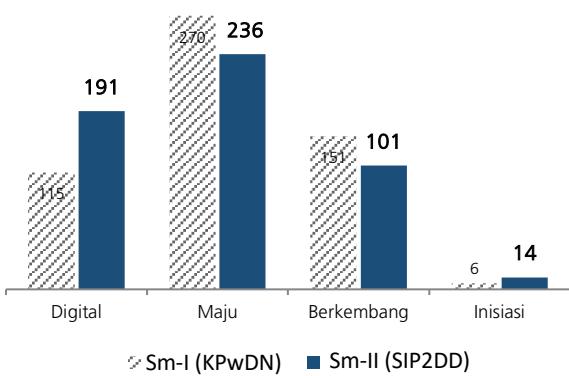
## 4.2. Perkembangan Indeks ETPD – Nasional

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada semester II 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks ETPD<sup>1</sup>, jumlah pemerintah daerah yang berada di Tahap Digital mencapai 191 pemerintah daerah, meningkat dibanding semester I sebanyak 115 pemerintah daerah. Sementara itu jumlah pemerintah daerah di Tahap Maju sebesar 236 pemerintah daerah dan pada tahap Berkembang menjadi 101 pemerintah daerah, dan di Tahap Inisiasi sebesar 14 pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

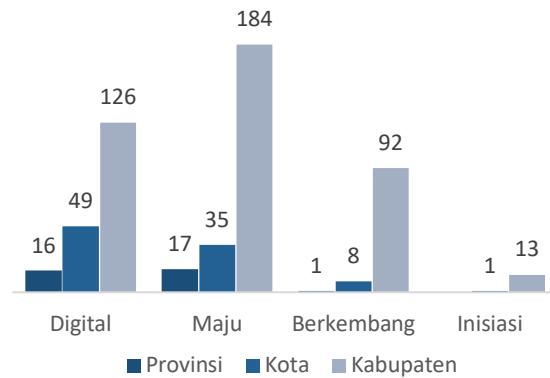
- a. Pemerintah daerah yang berada di Tahap Digital sebanyak 191 pemerintah daerah atau 35,2% dari total 542 pemerintah daerah, yang terdiri dari 16 Provinsi, 49 Kota, dan 126 Kabupaten.
- b. Pemerintah daerah yang berada di Tahap Maju sebanyak 236 pemerintah daerah atau 43,5% dari total 542 Pemerintah daerah, yang terdiri dari 17 Provinsi, 35 Kota, dan 184 Kabupaten.
- c. Pemerintah daerah yang berada di Tahap Berkembang sebanyak 101 pemerintah daerah atau 18,6% dari total 542 Pemerintah daerah, yang terdiri dari 1 Provinsi, 8 Kota, dan 92 Kabupaten.
- d. Pemerintah daerah yang berada di Tahap Inisiasi sebanyak 14 pemerintah daerah tingkat kabupaten atau 2,6% dari total 542 Pemerintah daerah, yang terdiri dari 1 Kota dan 13 Kabupaten.

<sup>1</sup> Indeks ETPD merupakan metodologi pengukuran yang digunakan untuk memetakan, memonitor perkembangan, dan mengukur elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di suatu daerah relatif dengan daerah lain melalui penilaian aspek implementasi, aspek realisasi serta aspek lingkungan strategis

**Grafik 2.2. Tahapan Elektronifikasi Pemerintah daerah**



**Grafik 2.3. Capaian Implementasi ETPD per Tingkat Pemda**



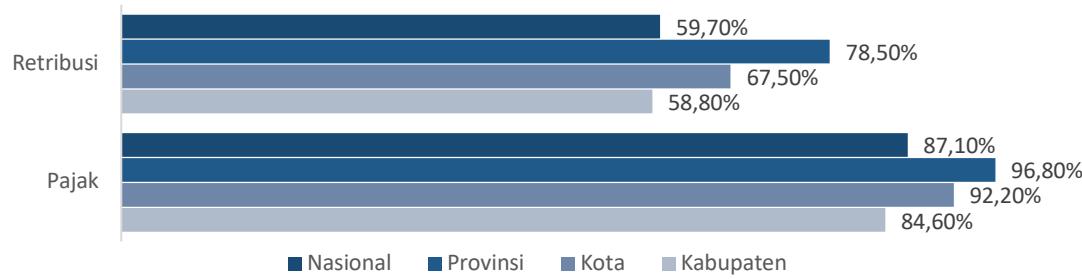
Sumber: Bank Indonesia

### 4.3. Implementasi ETPD Semester II Tahun 2021 – Nasional

Berdasarkan data pelaporan ETPD, elektronifikasi transaksi pembayaran pajak pada semester II 2021 secara nasional mencapai 87,1% dari total pajak yang dipungut. Sementara, elektronifikasi transaksi pajak pada pemerintah daerah di tingkat provinsi memiliki capaian tertinggi sebesar 96,8%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 92,2% dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 84,6% dari total pajak yang dipungut (Grafik 2.4).

Selanjutnya, capaian elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi secara nasional pada semester II 2021 sebesar 59,7% dari total retribusi yang dipungut. Capaian elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi tertinggi terdapat pada pemerintah daerah di tingkat provinsi sebesar 78,5%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 67,5% dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 58,8% dari total retribusi yang dipungut (Grafik 2.4).

Grafik 2.4 – Elektronifikasi Pajak dan Retribusi Tahun 2021



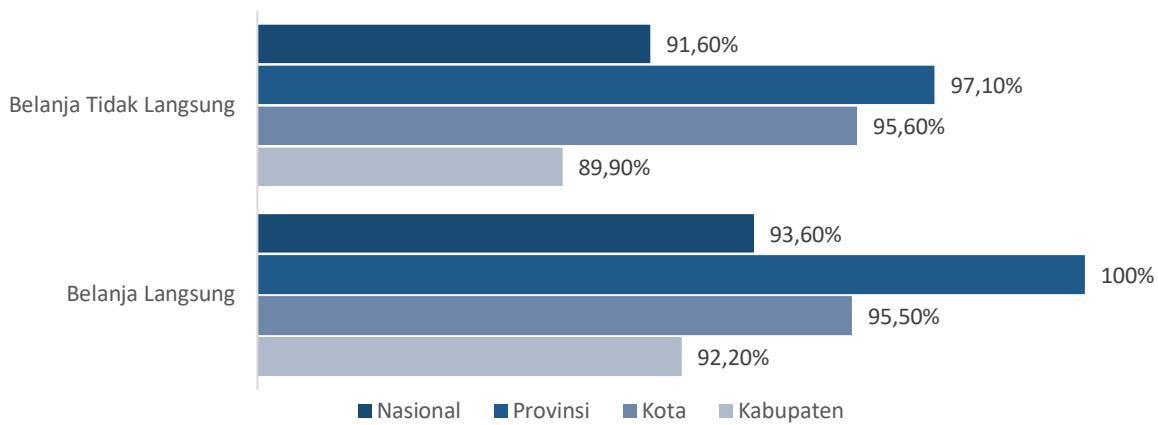
Sumber: Bank Indonesia, 2021

Pada semester II 2021, capaian elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung secara nasional sebesar 91,6% dari total belanja tidak langsung yang dianggarkan. Sementara, capaian elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung pemerintah daerah di tingkat provinsi sebesar 97,1%, pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 95,6% dan

pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 89,9% dari total belanja tidak langsung yang dianggarkan.

Di sisi lain, **elektronifikasi transaksi belanja langsung** pada semester II 2021 secara nasional tercatat telah mencapai 93,6% dari total belanja langsung yang dianggarkan. Capaian elektronifikasi transaksi belanja langsung tertinggi terdapat pada pemerintah daerah di tingkat provinsi yang telah mencapai 100%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 95,5%, dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 92,2% dari total belanja langsung yang dianggarkan (Grafik 2.5).

Grafik 2.5. – Elektronifikasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2021



Sumber: Bank Indonesia, 2021

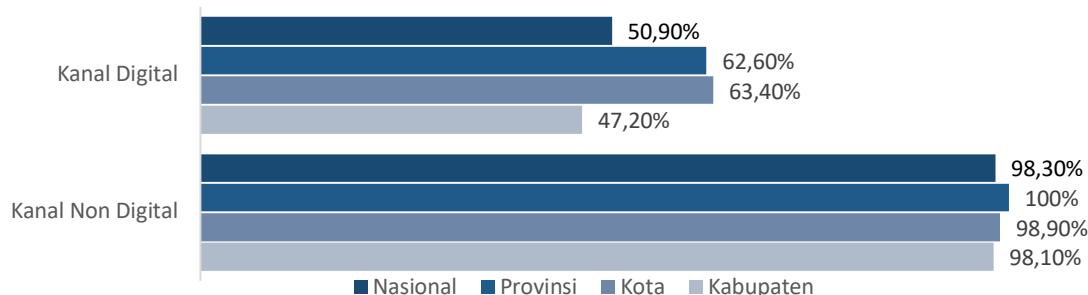
Kanal pembayaran non digital (*loket bank atau teller*) untuk transaksi pajak dan retribusi secara nasional pada semester II 2021 telah digunakan oleh 533 pemerintah daerah atau 98,3% dari total 542 pemerintah daerah. Dengan demikian, hampir seluruh pemerintah daerah telah memanfaatkan layanan *teller* atau loket bank untuk pembayaran pajak dan retribusi. Penggunaan kanal pembayaran non digital tertinggi terdapat pada pemerintah daerah di tingkat provinsi sebesar 100%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 98,9%, dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 98,1% (Grafik 2.6).

Pada grafik 2.6, juga ditunjukkan capaian penggunaan kanal digital berupa ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, Agen Bank, UE Reader, *e-commerce* dan QRIS oleh pemerintah daerah secara nasional telah mencapai 50,9% pada semester II 2021. Pemerintah daerah tingkat kota memiliki capaian penggunaan kanal digital tertinggi sebesar 63,4%, disusul oleh pemerintah daerah tingkat provinsi sebesar 62,2%, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten sebesar 47,2%.

Selanjutnya, kanal pembayaran digital yang paling banyak digunakan oleh pemerintah daerah adalah mesin ATM sebanyak 435 pemerintah daerah, *Internet/Mobile/SMS Banking* sebanyak 407 pemerintah daerah, QRIS sebanyak 243 pemerintah daerah, serta mesin EDC dan transaksi melalui platform online/*e-commerce* sebanyak 233 pemerintah daerah. Capaian tersebut menunjukkan penggunaan kanal

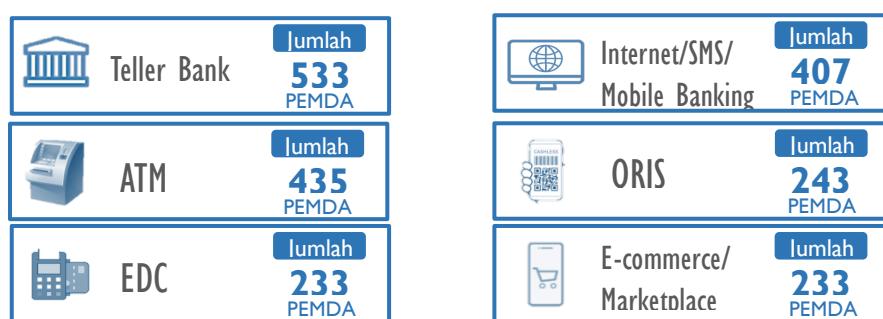
pembayaran digital, terutama mesin EDC, QRIS, dan *e-commerce* masih perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi penerimaan PAD (Gambar 2.7).

Grafik 2.6. – Penggunaan Kanal Digital dan NonDigital Tahun 2021



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Gambar 2.7. – Pemanfaatan Kanal Pembayaran



Sumber: Bank Indonesia, 2021

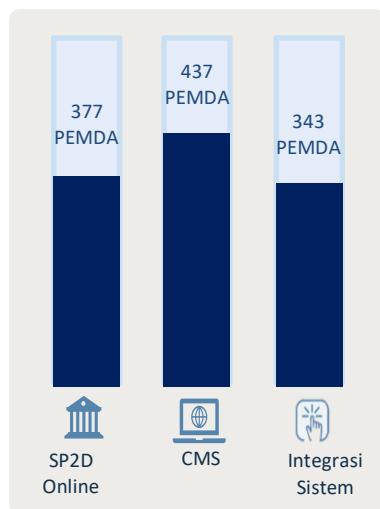
Penggunaan SP2D *online* secara nasional telah dilakukan oleh 377 pemerintah daerah atau 69,6% dari total 542 Pemerintah daerah pada semester II 2021 (Gambar 2.3). Pemanfaatan SP2D *online* pada pemerintah daerah tingkat provinsi telah mencapai 88,2%, pada tingkat kota sebesar 77,4% dan pada tingkat kabupaten mencapai 66,3% (Grafik 2.7).

Sementara, *Cash Management System* (CMS) secara nasional telah diimplementasikan di 437 pemerintah daerah atau 80,6% dari total 542 Pemerintah daerah pada semester II 2021 (Gambar 2.3). Penggunaan CMS pada tingkat pemerintah tingkat provinsi telah mencapai 97,1%, pada tingkat Kota 89,2% dan pada tingkat Kabupaten 77,3% (Grafik 2.7).

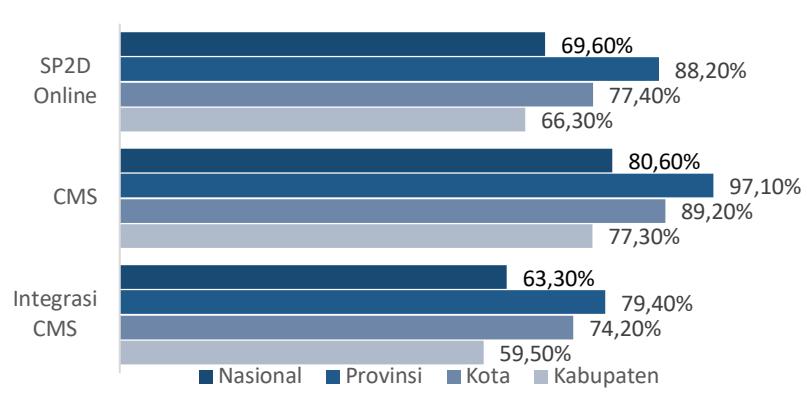
Integrasi antara *Cash Management System* (CMS) dan sistem keuangan pemda secara nasional telah mencapai 343 pemerintah daerah atau 63,3% dari total 542 pemerintah daerah pada semester II 2021 (Gambar 2.3). Integrasi CMS dan sistem

keuangan pemda pada pemerintah daerah tingkat provinsi telah mencapai 79,4%, pada tingkat Kota 74,2% dan pada tingkat Kabupaten 59,5% (Grafik 2.7).

Gambar 2.3. Penggunaan Sistem Infomasi 2021



Grafik 2.7. Penggunaan Sistem Infomasi 2021



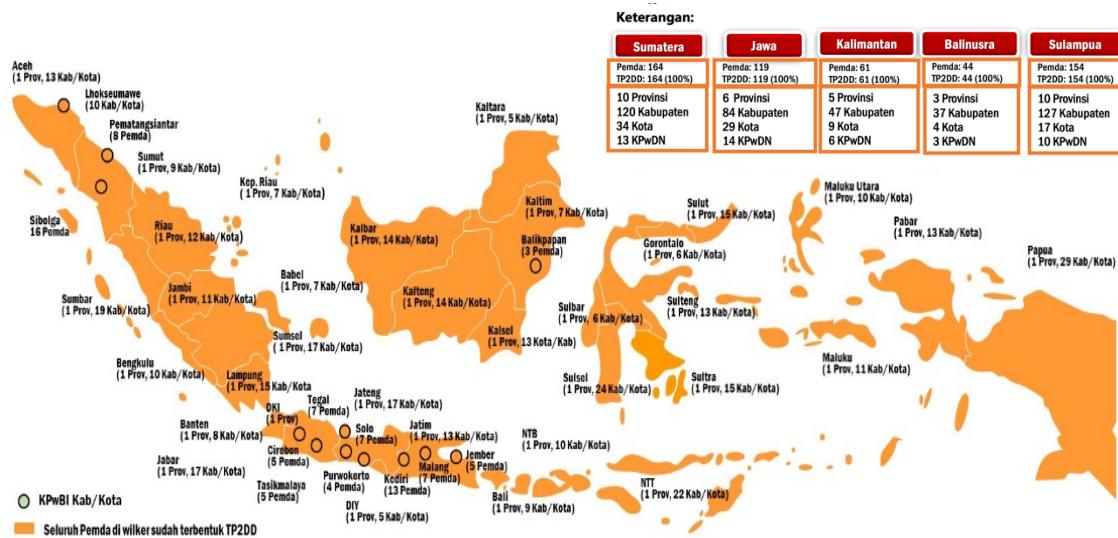
Sumber: Bank Indonesia, 2021

## 5. BAB III PERKEMBANGAN ETPD REGIONAL

### 5.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD di Daerah (Per Tingkat Pemerintah Daerah)

Pada semester II 2021, seluruh wilayah telah membentuk TP2DD yang terdiri atas wilayah Sumatera sebanyak 164 pemerintah daerah (10 tingkat provinsi, 120 tingkat kabupaten dan 34 tingkat kota), wilayah Jawa sebanyak 119 pemerintah daerah (6 tingkat provinsi, 84 tingkat kabupaten dan 29 tingkat kota), wilayah Kalimantan sebanyak 61 pemerintah daerah (5 tingkat provinsi, 47 tingkat kabupaten dan 9 tingkat kota), wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sebanyak 44 pemerintah daerah (3 tingkat provinsi, 37 tingkat kabupaten dan 4 tingkat kota), dan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) sebanyak 154 pemerintah daerah (10 tingkat provinsi, 127 tingkat kabupaten dan 17 tingkat kota) (Gambar 3.1).

Gambar 3.1. Peta Pembentukan TP2DD



Sumber: Bank Indonesia

Salah satu kunci keberhasilan pembentukan TP2DD di daerah yaitu dengan terbentuknya Keppres No.3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 serta komunikasi yang efektif salah satunya melalui penyelenggaraan *event* Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tahun 2021 dengan tema "Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia" yang dilakukan pada 5-8 April 2021 yang melibatkan Satgas P2DD dan K/L lainnya, pemerintah daerah, asosiasi, maupun industri jasa keuangan.

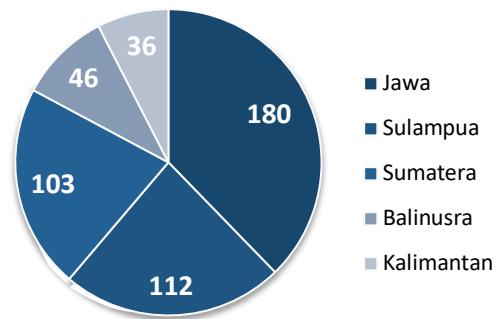
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga melakukan kegiatan yang sama sebagai salah satu dukungan FEKDI Pusat, sebanyak 477 *event* yang dilakukan di 34

Provinsi sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat dalam hal digitalisasi maupun *event* strategis antara lain *High Level Meeting* (HLM) yang dilakukan daerah dalam hal pembentukan TP2DD. Jawa menjadi wilayah terbanyak yang melakukan *event* dengan total 180 *event*, Sulampua 112 *event*, Sumatera 103 *event*, Balinusra 46 *event* dan Kalimantan 36 *event* (Grafik 3.1).

**Gambar 3.2.** Pelaksanaan FEKDI Tahun 2021



**Grafik 3.1.** Pelaksanaan *Event* Pendukung FEKDI di Daerah



Sumber: Bank Indonesia

## 5.2. Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

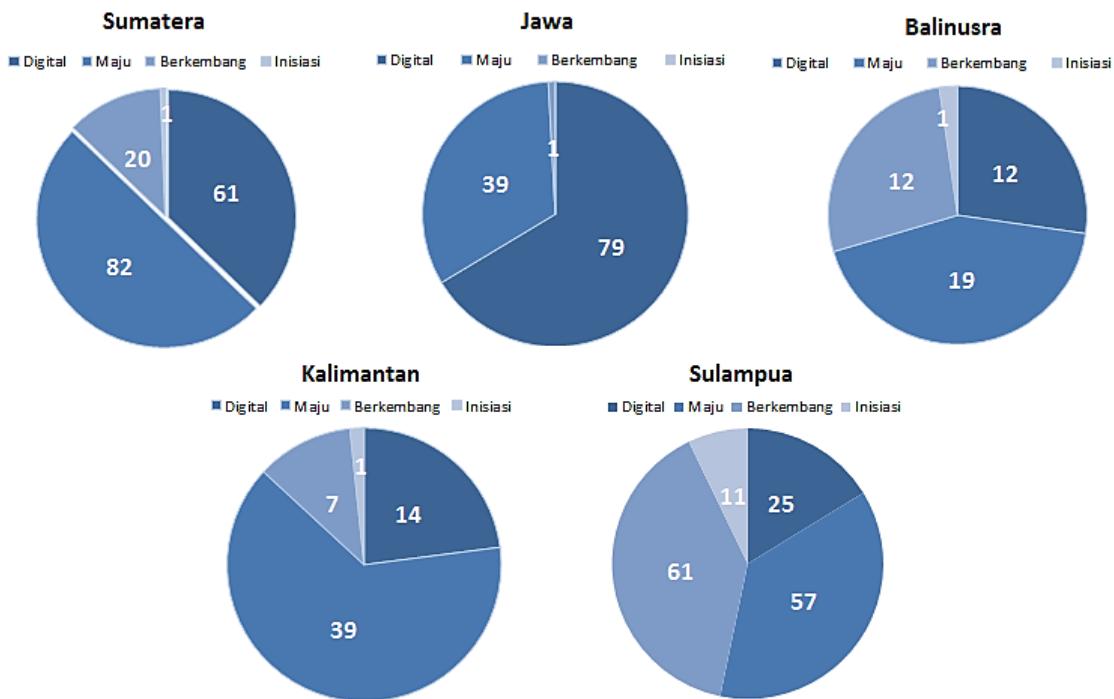
Dari 191 pemerintah daerah yang berada di Tahap Digital, sebagian besar berada di wilayah Jawa sebanyak 79 pemerintah daerah, disusul oleh Sumatera sebanyak 61 pemerintah daerah, Sulampua sebanyak 25 pemerintah daerah, Kalimantan sebanyak 14 pemerintah daerah, dan Balinusra sebanyak 12 pemerintah daerah.

Sedangkan, Tahap Maju sebanyak 236 pemerintah daerah tersebar di wilayah Sumatera sebanyak 82 pemerintah daerah, disusul oleh Sulampua sebanyak 57 pemerintah daerah, Jawa sebanyak 39 pemerintah daerah, Kalimantan sebanyak 39 pemerintah daerah dan Balinusra sebanyak 19 pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang berada di Tahap Berkembang didominasi dari Sulampua sebanyak 61 pemerintah daerah, Sumatera sebanyak 20 pemerintah daerah, Balinusra sebanyak 12 pemerintah daerah, Kalimantan sebanyak 7 pemerintah daerah dan Jawa sebanyak 1 pemerintah daerah.

Sementara Pemerintah daerah yang masih berada di Tahap Inisiasi sebanyak 14 pemerintah daerah sebagian besar berasal dari Sulampua sebanyak 11 pemerintah daerah dan sisanya berasal dari wilayah Sumatera, Balinusra dan Kalimantan masing-masing sebanyak 1 (satu) pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah di tingkat inisiasi berada di wilayah kepulauan dan pegunungan, salah satunya Kabupaten Lanny Jaya sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sistem pembayaran nontunai.

**Grafik 3.2.** Tahapan Elektronifikasi Per Wilayah



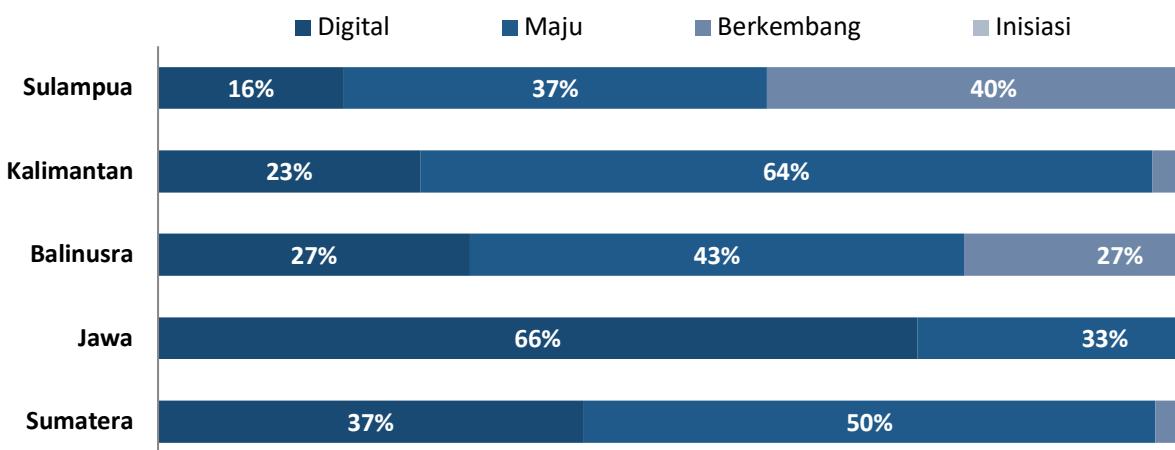
Sumber: Bank Indonesia

Sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Jawa atau 66% sudah berada di tahap Digital, di tahap Maju sebanyak 33%, dan tahap Berkembang sebanyak 1% dari total 119 pemerintah daerah serta tidak terdapat pemerintah daerah di Wilayah Jawa yang termasuk dalam tahap Inisiasi (Grafik 3.3).

Pemerintah daerah di Kalimantan, Sumatera dan Balinusra sebagian besar berada di tahap Maju. Wilayah Kalimantan memiliki pemerintah daerah di tahap Maju sebanyak 64%, di tahap Digital mencapai 23%, tahap Berkembang sebanyak 11% dan tahap Inisiasi sebanyak 2% dari total 61 pemerintah daerah. Wilayah Sumatera memiliki pemerintah daerah di tahap Maju sebanyak 50%, di tahap Digital mencapai 37%, di tahap Berkembang sebanyak 12% dan tahap Inisiasi sebanyak 1% dari total 164 pemerintah daerah. Wilayah Balinusra memiliki pemerintah daerah di tahap Maju sebanyak 43%, di tahap Digital mencapai 27%, di tahap Berkembang sebanyak 27% dan tahap Inisiasi sebanyak 2% dari total 44 pemerintah daerah (Grafik 3.3).

Pemerintah daerah di Wilayah Sulampua sebagian besar masih berada di tahap Berkembang 40%, di tahap Maju sebanyak 37%, di tahap Digital 16% dan tahap Inisiasi sebanyak 7% dari total 154 pemerintah daerah (Grafik 3.3). Dengan demikian, perlu adanya dorongan dalam melakukan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terutama dalam transaksi pendapatan daerah.

Grafik 3.3. Capaian Implementasi ETPD per Wilayah



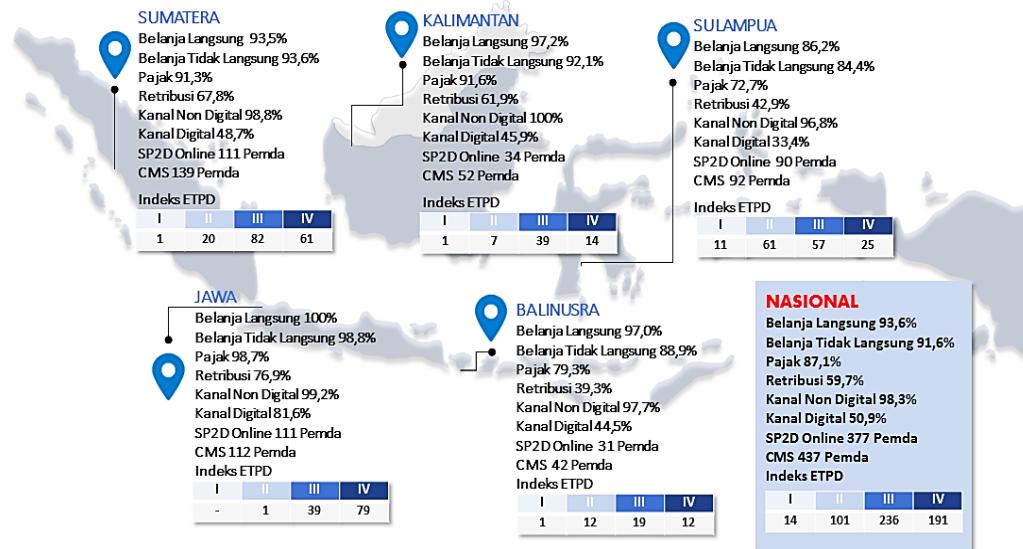
Sumber: Bank Indonesia

### 5.3. Implementasi IETPD Semester II Tahun 2021

Capaian elektronifikasi transaksi pembayaran pajak pada semester II tahun 2021 secara nasional sebesar 87,1% dari pajak yang dipungut, sedangkan elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi mencapai 59,7% dari retribusi yang dipungut. Gambar 3.3 menunjukkan capaian elektronifikasi pajak tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 98,7% dari pajak yang dipungut, disusul oleh wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 91,6%, wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 91,3%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 79,3%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 72,7% dari pajak yang dipungut. Sementara itu, capaian elektronifikasi retribusi tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 76,9% dari retribusi yang dipungut, disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 67,8%, wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 61,9%, wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 42,9%, dan wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 39,3% dari retribusi yang dipungut.

Elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung pada semester II 2021 secara nasional mencapai 91,6%, sedangkan elektronifikasi transaksi belanja langsung secara nasional mencapai 93,6%. Gambar 3.3 menunjukkan capaian elektronifikasi belanja tidak langsung tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 98,8% dari seluruh jenis belanja tidak langsung yang dianggarkan, disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 93,6%, wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 92,1%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 88,9%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 84,4% dari seluruh jenis belanja tidak langsung yang dianggarkan. Sementara itu, capaian elektronifikasi belanja langsung tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 100,0% dari seluruh jenis belanja langsung yang dianggarkan, disusul oleh wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 97,2%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 97,0%, wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 93,5%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 86,2% dari seluruh jenis belanja langsung yang dianggarkan.

Gambar 3.3. Disagregasi IETPD Per Wilayah



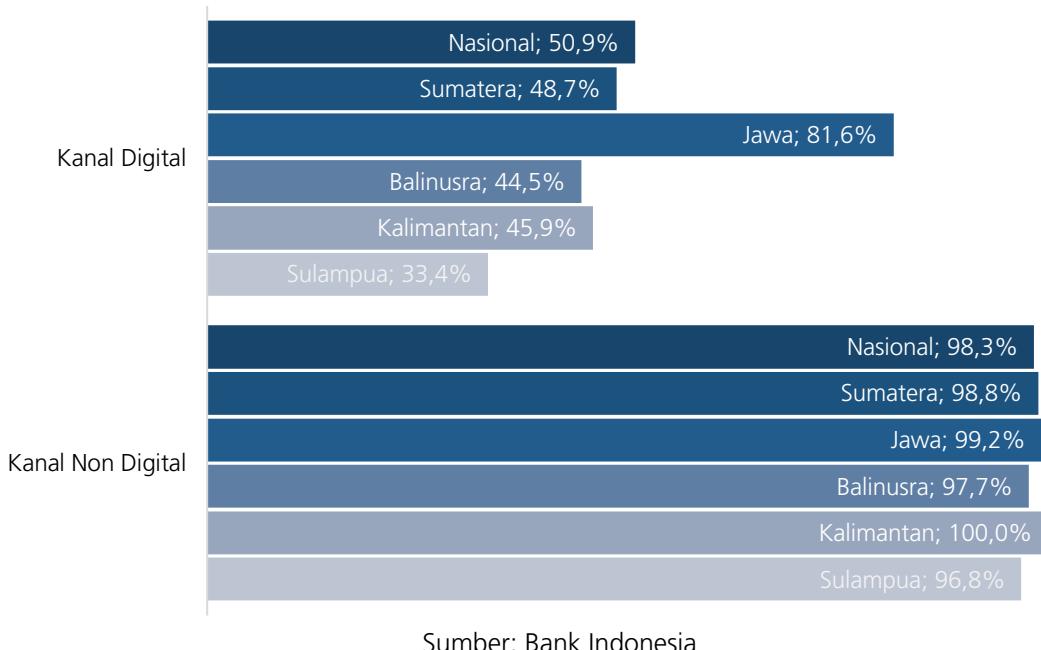
Sumber: Bank Indonesia

Penggunaan kanal pembayaran non digital (*loket bank atau teller*) pada semester II tahun 2021 secara nasional mencapai 98,3% dari total 542 pemerintah daerah. Grafik 3.4 menunjukkan wilayah Kalimantan memiliki capaian penggunaan kanal non digital tertinggi dengan capaian pada semester II 2021 sebesar 100%. Capaian tersebut, disusul oleh wilayah Jawa dengan capaian pada semester II 2021 sebesar 99,2%, wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 98,8%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 97,7%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 96,8%.

Sementara, penggunaan kanal pembayaran digital (QRIS, ATM, EDC, Agen Bank, *Mobile/Internet/SMS Banking, UE Reader, dan e-commerce*) oleh pemerintah daerah di wilayah lainnya masih relatif kecil sebesar 50,9%. Capaian penggunaan kanal pembayaran digital tertinggi terdapat di wilayah Jawa sebesar 81,6%. Capaian tersebut, disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 48,7%, wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 45,9%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 44,5%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 33,4% (Grafik 3.4).

Capaian tersebut menunjukkan penggunaan kanal pembayaran digital, terutama mesin EDC, QRIS, dan *e-commerce* masih perlu didorong terutama pada wilayah Sulampua untuk meningkatkan efisiensi pembayaran transaksi penerimaan PAD terutama pembayaran transaksi pajak dan retribusi.

**Grafik 3.4.** Ketersediaan Kanal Digital dan Non-Digital



Sumber: Bank Indonesia

**Penggunaan SP2D online** di semester II tahun 2021 secara nasional telah dilakukan oleh 377 pemerintah daerah (69,6%). Pada tabel 3.1, penggunaan SP2D Online tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebanyak 111 pemerintah daerah (93,3%), disusul oleh wilayah Balinusra dengan capaian sebanyak 31 pemerintah daerah (70,5%), wilayah Sumatera dengan capaian sebanyak 111 pemerintah daerah (67,7%), wilayah Sulampua dengan capaian sebanyak 90 pemerintah daerah (58,4%) dan wilayah Kalimantan dengan capaian sebanyak 34 pemerintah daerah (55,7%).

**Cash Management System (CMS)** pada semester II tahun 2021 secara nasional telah diimplementasikan di 437 pemerintah daerah (80,6%). Capaian Implementasi CMS tertinggi terdapat di wilayah Balinusra, yaitu sebanyak 42 pemerintah daerah (95,5%), disusul oleh wilayah Jawa dengan capaian sebanyak 112 pemerintah daerah (94,1%), wilayah Kalimantan dengan capaian sebanyak 52 pemerintah daerah (85,2%), wilayah Sumatera dengan capaian sebanyak 139 pemerintah daerah (84,8%) dan wilayah Sulampua dengan capaian sebanyak 92 pemerintah daerah (59,7%).

Sementara itu, **Integrasi antara CMS dan sistem keuangan pemda** pada semester II 2021 telah mencapai 343 pemerintah daerah (63,3%). Capaian integrasi CMS tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebanyak 89 pemerintah daerah (74,8%), disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebanyak 109 pemerintah daerah (66,5%), wilayah Balinusra dengan capaian sebanyak 27 pemerintah daerah (61,4%), wilayah Kalimantan dengan capaian sebanyak 36 pemerintah daerah (59,0%) dan wilayah Sulampua dengan capaian sebanyak 82 pemerintah daerah (53,2%).

**Tabel 3.1.** Ketersediaan SP2D Online dan CMS di Wilayah Pemda

Sistem Keuangan	Nasional	Sumatera	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
SP2D Online	377 Pemda (69,5%)	111 Pemda (67,7%)	111 Pemda (93,3%)	31 Pemda (70,5%)	34 Pemda (55,7%)	90 Pemda (58,4%)
CMS	437 Pemda (80,6%)	139 Pemda (84,8%)	112 Pemda (94,1%)	42 Pemda (95,5%)	52 Pemda (85,2%)	92 Pemda (59,7%)
Integrasi CMS	343 Pemda (63,3%)	109 Pemda (66,5%)	89 Pemda (74,8%)	27 Pemda (61,4%)	36 Pemda (59,0%)	82 Pemda (53,2%)
Jumlah Pemda	542 Pemda	164 Pemda	119 Pemda	44 Pemda	61 Pemda	154 Pemda

Sumber: Bank Indonesia

Hasil pemetaan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur menunjukkan adanya ketidakmerataan ketersediaan jaringan terutama jaringan 4G. Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah Sumatera memiliki ketersediaan jaringan 4G yang paling tinggi, sebanyak 88 pemerintah daerah dengan cakupan 76% - 100% kecamatan / desa di wilayahnya sudah tercover 4G (Tabel 3.2). Capaian tersebut, disusul oleh wilayah Jawa sebanyak 87 pemerintah daerah. Sementara itu, wilayah Sulampua memiliki ketersediaan jaringan 4G yang relatif kecil dan tidak merata, hal ini menunjukkan bahwa wilayah Sulampua memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan dan perluasan jaringan 4G terutama pada 17 pemerintah daerah yang kecamatan / desa yang hanya mencakup 1% - 25% jaringan 4G.

**Tabel 3.2.** Cakupan Layanan 4G di wilayah Pemda

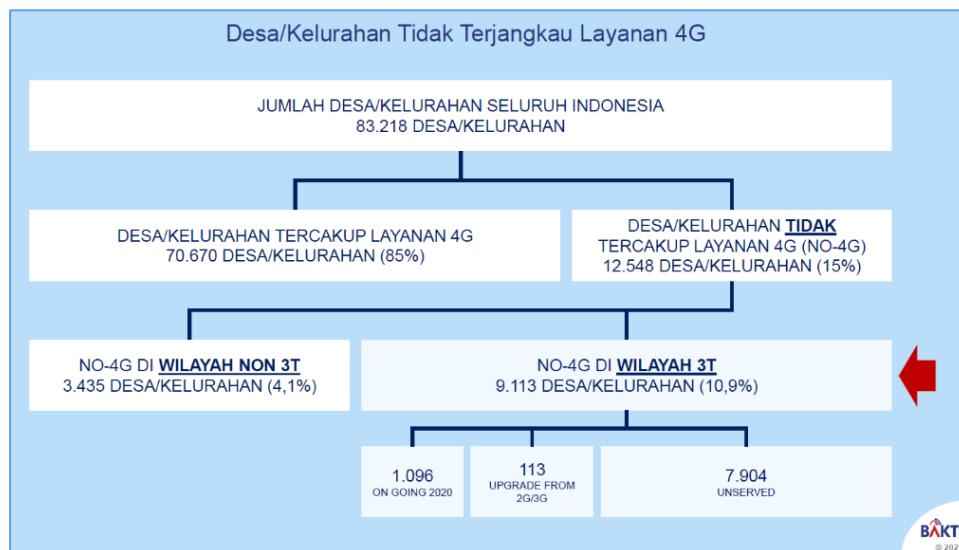
Ketersediaan Jaringan 4G	Sumatera	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
1% s.d 25%	8	3	3	6	17
26% s.d 50%	17	7	8	11	28
51% s.d 75%	51	22	18	21	55
76% s.d 100%	88	87	15	23	53
Belum Ada	-	-	-	-	1
Total	164	119	44	61	154

Sumber: Bank Indonesia

Hal ini sejalan dengan informasi dari Kemenkominfo – BAKTI bahwa secara nasional daerah yang tercakup dengan layanan 4G sebanyak 70.670 desa/kelurahan atau 85% dari 83.218 desa/kelurahan. Sedangkan, wilayah lainnya belum tercakup dengan layanan 4G (non-4G) sebanyak 12.548 desa/kelurahan terdiri atas wilayah Non 3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan dan wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) sebanyak 9.113 desa/kelurahan masuk kedalam wilayah 3T.

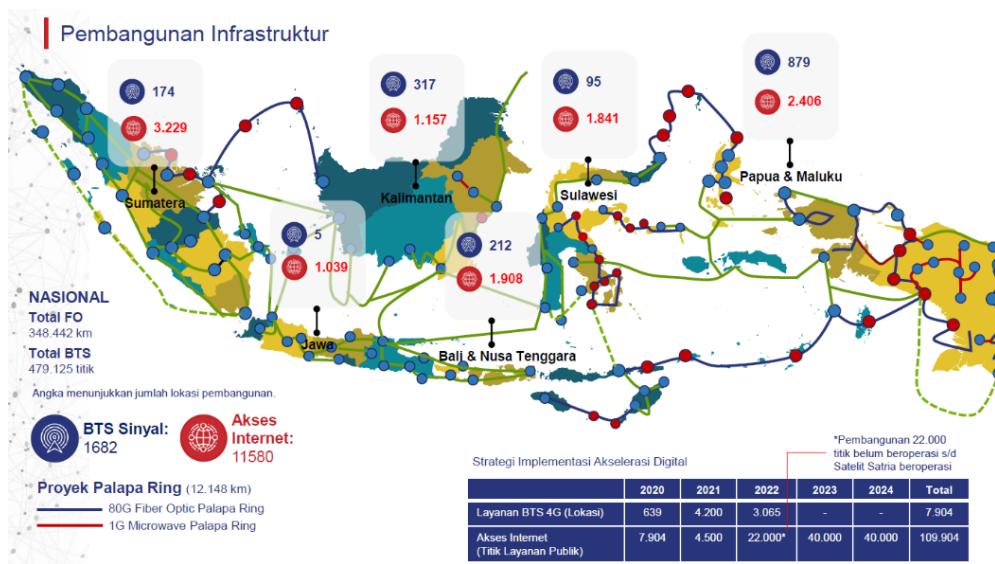
Dalam tahapannya pengembangan infrastruktur akan terus dilakukan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kominfo – BAKTI dengan estimasi pembangunan layanan BTS 4G (lokasi) pada tahun 2022 sebanyak 3.065 BTS, dengan pembangunan akses internet (titik layanan publik) tahun 2022 sebanyak 22.000 titik s.d satelit Satria beroperasi.

Gambar 3.4. Penyebaran Layanan Jaringan 4G



Sumber: BAKTI - Kemenkominfo

Gambar 3.5. Pembangunan Infrastruktur

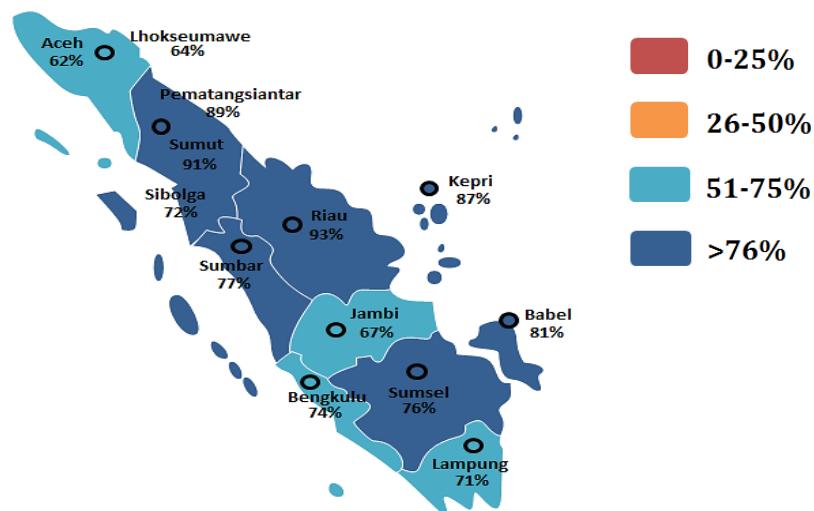


Sumber: BAKTI - Kemenkominfo

## 5.4. Implementasi ETP Berdasarkan Regional

### 5.4.1. Sumatera

Gambar 3.6. Mapping Implementasi ETPD - Sumatera



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan seluruh pemda di wilayah Sumatera, terdapat 6 provinsi yang rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berada pada level  $>76\%$ , yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan sedangkan 4 provinsi lainnya memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD pemda sekitar 51-75%, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung (Gambar 3.6).

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 134 pemerintah daerah atau 81,7% dari total 164 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 82 pemda atau 50,0% total 164 pemerintah daerah telah

#### Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kota Batam – Kepulauan Riau

Kota Batam telah melakukan implementasi ETPD Integrasi pembayaran pajak hotel dan restoran melalui mesin *tapping box* bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, pelaksanaan lelang elektronik hingga penerapan QRIS untuk transaksi pembayaran Trans Batam. Akselerasi elektronifikasi di Pemda Kota Batam dapat terlihat dari peningkatan tahapan IETPD Pemda dari Tahap Berkembang pada awal tahun 2021, meningkat Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi pendapatan daerah (pajak dan retribusi) dan belanja daerah (belanja langsung dan tidak langsung). Selain itu, Kota Batam juga telah berhasil mengimplementasikan SP2D Online dan CMS serta mengintegrasikannya.

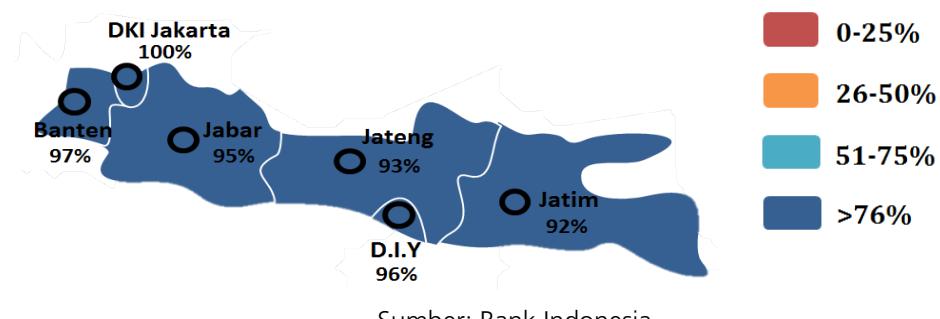
mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce*, dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 111 pemerintah daerah (67,7%) telah menggunakan SP2D *Online*, 139 pemerintah daerah (84,8%) telah memiliki CMS, serta 109 pemerintah daerah (66,5%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda.

Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Sumatera sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada sebanyak 132 atau 80,5% dari total 164 pemerintah daerah.

#### 5.4.2. Jawa

Gambar 3.7. Mapping Implementasi ETP - Jawa



Berdasarkan hasil implementasi ETPD baik dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan, seluruh pemda di wilayah Jawa memiliki rata-rata implementasi ETPD yang sangat baik dan merata (>76%) (Gambar 3.7). Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pemda di wilayah jawa telah melakukan implementasi elektronifikasi pada transaksi belanja maupun pendapatan daerah secara optimal.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 114 pemerintah daerah atau 95,8% dari total 119 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 58 pemda atau 48,7% total 119 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce*, dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara

CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 111 pemerintah daerah (93,3%) telah menggunakan SP2D *Online*, 112 pemerintah daerah (94,1%) telah memiliki CMS, serta 89 pemerintah daerah (74,8%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda *online*.

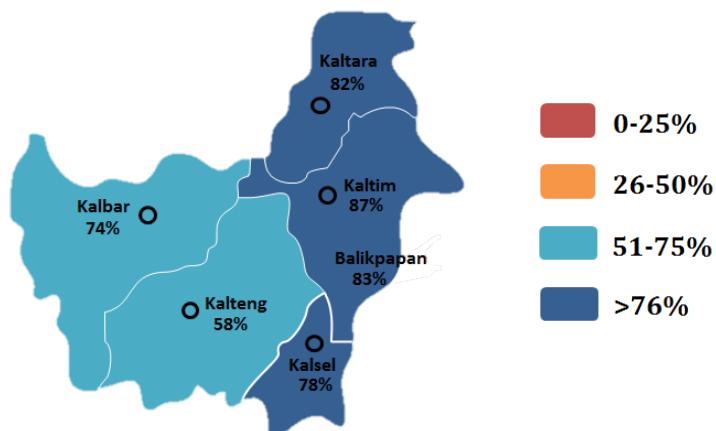
Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 114 atau 95,8% dari total 119 pemerintah daerah.

### Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kab. Pandeglang - Banten

Kabupaten Pandeglang berhasil meningkatkan tahapan elektronifikasi Pemda dari Berkembang di awal tahun 2021, menjadi Maju pada pertengahan tahun 2021 kemudian menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut, didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi Pajak, Retribusi, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selain itu, Kabupaten Pandeglang juga telah berhasil mengimplementasikan seluruh kanal pembayaran non digital (Teller/ LoketBank) dan kanal digital (ATM, EDC, *Mobile/Internet/SMS Banking*, uang elektronik dan platform digital lainnya). Hal tersebut dapat dicapai oleh berbagai inovasi yang telah dilakukan, salah satunya implementasi QRIS pada Puskeswan.

#### 5.4.3. Kalimantan

Gambar 3.8. Mapping Implementasi ETP - Kalimantan



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan seluruh pemda di wilayah Kalimantan, terdapat 3 provinsi yang rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berada pada level >76%, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Gambar

3.8). Sementara itu, 2 provinsi lainnya memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD berkisar 51-75%, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 52 pemerintah daerah atau 85,2% dari total 61 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 25 pemerintah daerah atau 41,0% total 61 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *e-commerce* dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 34 pemerintah daerah (55,7%) telah menggunakan SP2D *Online*, 52 pemerintah daerah (85,2%) telah memiliki CMS, serta 36 pemerintah daerah (59,0%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online.

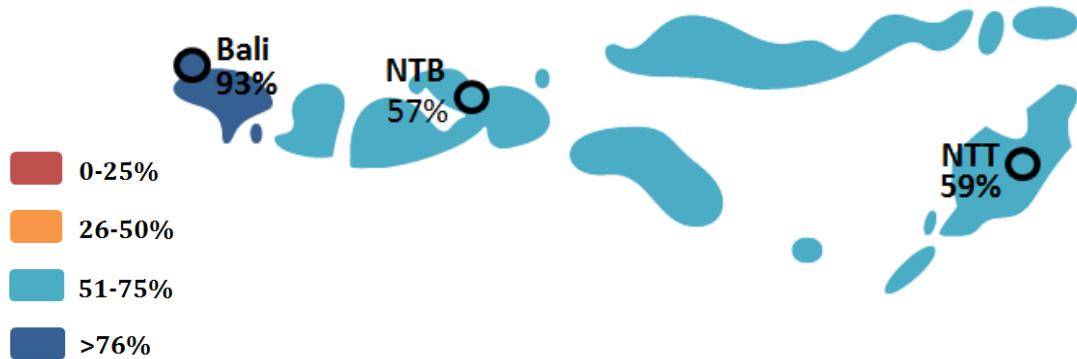
Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 53 atau 70,5% dari total 61 pemerintah daerah.

#### Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kota Tarakan – Kalimantan Utara

Kota Tarakan berhasil meningkatkan tahapan elektronifikasi dari Maju pada awal tahun 2021 menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Salah satu upaya implementasi ETPD dilakukan melalui inovasi pada transaksi pembayaran PBB secara online dan pembayaran retribusi parkir melalui uang elektronik. Kota Tarakan juga telah menyediakan seluruh kanal pembayaran non digital dan kanal digital terutama QRIS. Dalam mendukung implementasi ETPD, Kota Tarakan juga telah melakukan integrasi CMS.

#### 5.4.4. Balinusra

Gambar 3.9. Mapping Implementasi ETP - Balinusra



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan seluruh pemda di wilayah Balinusra, terdapat 1 provinsi yang rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berada pada level >76%, yaitu Provinsi Bali (Gambar 3.9). Sementara itu, 2 provinsi lainnya memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berkisar 51-75%, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 34 pemerintah daerah atau 77,3% dari total 44 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 8 pemerintah daerah atau 18,2% total 44 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, Internet/Mobile/SMS Banking, UE Reader, ecommerce dan Teller/Loket Bank.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara

#### Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Provinsi Bali

Provinsi Bali berhasil meningkatkan indeks ETPD yang semula pada tahap Maju pada awal tahun 2021 menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut, didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi pendapatan daerah (pajak dan retribusi) dan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

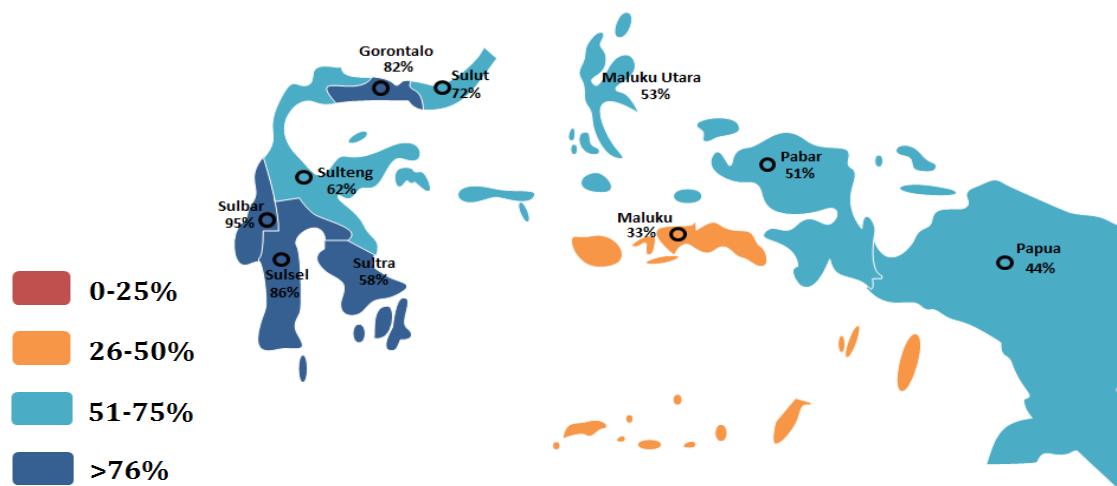
Selain itu, Provinsi Bali juga berhasil menggunakan kanal pembayaran non digital (teller/loket bank) dan meningkatkan penggunaan kanal digital pada akhir tahun 2021. Peran aktif bank daerah dalam mengintegrasikan layanan non tunai pada berbagai destinasi wisata juga menjadi faktor pendorong keberhasilan elektronifikasi di Provinsi Bali.

CMS dengan Sistem Keuangan Pemda *online* sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 31 pemerintah daerah (70,5%) telah menggunakan SP2D *Online*, 42 pemerintah daerah (95,5%) telah memiliki CMS, serta 27 pemerintah daerah (61,4%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda *online*.

Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 31 atau 70,5% dari total 44 pemerintah daerah.

#### 5.4.5. Sulampua

Gambar 3.10. Mapping Implementasi ETP - Sulampua



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan, pemerintah daerah di wilayah Sulampua memiliki implementasi ETPD yang lebih granular, terdapat 4 provinsi yang memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD berada pada level >76%, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 3.10). Selain itu, sebanyak 5 provinsi yang memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD pemda berada pada level 51-75%, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Sementara, Provinsi Maluku memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD berada pada level 26-50%.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 105 pemerintah daerah atau 68,2% dari total 154 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan,

sebanyak 47 pemerintah daerah atau 30,5% total 154 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce* dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 90 pemerintah daerah (58,4%) telah menggunakan SP2D *Online*, 92 pemerintah daerah (59,7%) telah memiliki CMS, serta 82 pemerintah daerah (53,2%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online.

Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 89 pemerintah daerah atau 57,8% dari total 154 pemerintah daerah.

#### Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kab. Pinrang – Sulawesi Selatan

Kabupaten Pinrang berhasil meningkatkan indeks ETPD dari berkembang pada awal tahun 2021 menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi pajak dan retribusi serta penggunaan kanal pembayaran non digital (*Teller/Loket Bank*) dan kanal digital.

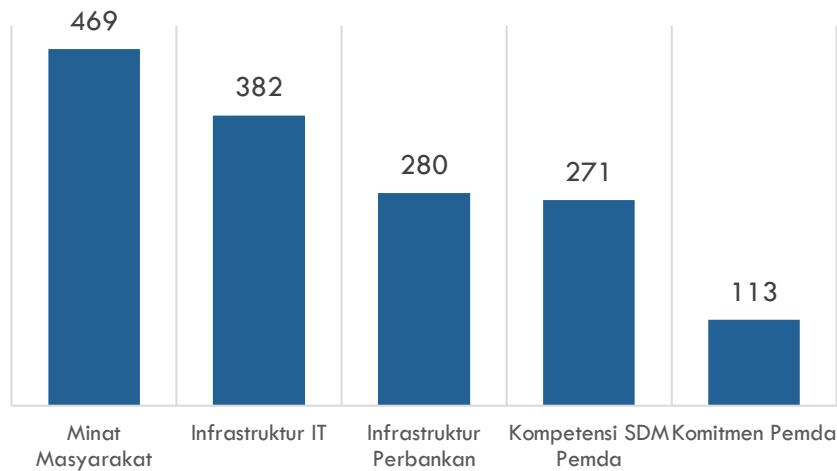
Dari sisi transaksi belanja, Kabupaten Pinrang telah melakukan elektronifikasi pada Selain itu, Kabupaten Pinrang juga telah berhasil mengintegrasikan CMS dengan SP2D online serta melakukan berbagai inovasi implementasi metode pembayaran non tunai terutama kanal QRIS menjadi faktor pendorong elektronifikasi pemda.

## 6. BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI

### 6.1. Kendala Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Minat masyarakat dan infrastruktur IT menjadi kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam mendorong ETPD. Sebanyak 469 pemerintah daerah melaporkan bahwa minat masyarakat dalam memanfaatkan kanal-kanal nontunai dalam transaksi pembayaran pajak dan retribusi masih perlu didorong. Selain itu, infrastruktur IT untuk mendorong digitalisasi daerah yang belum merata juga menjadi kendala bagi 382 pemerintah daerah. Adapun kendala tersebut berupa jangkauan layanan telekomunikasi dan internet, terutama di daerah terpencil. Kendala lainnya berupa ketersediaan infrastruktur pebankan di daerah di 280 pemerintah daerah, kompetensi SDM pemerintah daerah di 271 pemerintah daerah, serta komitmen pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan di 113 pemerintah daerah (Grafik 6.1).

Grafik 6.1. Pemetaan Kendala



Sumber: Bank Indonesia

Kendala terbesar yang dihadapi pemerintah daerah di wilayah Jawa adalah minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 105 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 52 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 43 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 38 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 14 pemerintah daerah (Tabel 6.1). Kalimantan juga memiliki kendala terbesar berasal dari minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 53 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 46 pemerintah

daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 45 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 31 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 8 pemerintah daerah. Mayoritas pemerintah daerah di wilayah Balinusra juga memiliki kendala minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 42 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 36 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 33 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 24 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 15 pemerintah daerah.

Tabel 6.1. Kendala Pemerintah daerah Dalam Mendorong ETPD di Daerah (pemerintah daerah)

No	Wilayah	Total	Minat Masyarakat	Infrastruktur IT	Infrastruktur Perbankan	Kompetensi SDM	Komitmen
1	Jawa	119	105	52	38	43	14
	Provinsi	6	4	0	2	0	0
	Kota	29	23	4	5	8	4
	Kabupaten	84	78	48	31	35	10
2	Sumatera	164	146	114	87	69	28
	Provinsi	10	9	6	6	2	1
	Kota	34	30	18	15	12	7
	Kabupaten	120	107	90	66	55	20
3	Kalimantan	61	53	46	45	31	8
	Provinsi	5	4	4	2	1	1
	Kota	9	8	4	7	5	2
	Kabupaten	47	41	38	36	25	5
4	Sulampua	154	123	134	86	95	48
	Provinsi	10	7	8	6	6	4
	Kota	17	16	11	9	12	5
	Kabupaten	127	100	115	71	77	39
5	Balinusra	44	42	36	24	33	15
	Provinsi	3	3	1	2	2	1
	Kota	4	4	2	2	2	1
	Kabupaten	37	35	33	20	29	13
6	Nasional	542	469	382	280	271	113
	Provinsi	34	27	19	18	11	7
	Kota	93	81	39	38	39	19
	Kabupaten	415	361	324	224	221	87

Sumber: Bank Indonesia

Di wilayah Sumatera, kendala terbesar yang dihadapi yakni minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 146 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 114 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 87 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 69 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 28 pemerintah daerah. Sementara itu, di wilayah Sulampua memiliki

pemerintah daerah yang sebagian besar menghadapi kendala pada minimnya infrastruktur IT sebanyak 134 pemerintah daerah, disusul dengan minat masyarakat sebanyak 123 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 95 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 86 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 48 pemerintah daerah (Tabel 6.1).

## **6.2. Rekomendasi Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**

Dalam rangka mempersiapkan ekosistem digital untuk mendorong perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, perlu adanya koordinasi dan fasilitasi peningkatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara bersama-sama baik di tingkat pusat maupun daerah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. **Melaksanakan edukasi dan sosialisasi** dalam meningkatkan literasi dan minat masyarakat untuk bertransaksi nontunai khususnya dengan menggunakan kanal pembayaran digital seperti QRIS, *e-commerce*, dan *internet/mobile banking*.
- b. **Mendorong kesiapan infrastruktur jaringan IT** melalui koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Komunikasi dan Informasi di masing-masing pemerintah daerah.
- c. **Mendorong sosialisasi kepada Pemda** untuk meningkatkan partisipasi dan keakuriasan pelaporan implementasi ETPD dalam SIP2DD.
- d. **Mendorong perluasan ETPD** terutama dengan menggunakan kanal pembayaran digital, termasuk mendorong kesiapan BPD untuk bekerjasama dengan bank lain/PJP atau platform digital/*ecommerce*.
- e. **Meningkatkan komitmen koordinasi** antara pemerintah daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) melalui TP2DD untuk mendorong peningkatan indeks ETPD sebagai salah satu faktor dalam penilaian *championship* TP2DD secara nasional.

## 7. LAMPIRAN

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
1	Provinsi	Provinsi Bali	86,2%	Digital	94%	100%	52%
2	Kota	Kota Denpasar	94,5%	Digital	92%	100%	100%
3	Kabupaten	Kabupaten Badung	95,1%	Digital	93%	100%	100%
4	Kabupaten	Kabupaten Bangli	89,5%	Digital	85%	100%	99%
5	Kabupaten	Kabupaten Buleleng	79,9%	Maju	91%	75%	43%
6	Kabupaten	Kabupaten Gianyar	88,4%	Digital	87%	75%	100%
7	Kabupaten	Kabupaten Jembrana	95,2%	Digital	97%	75%	99%
8	Kabupaten	Kabupaten Karangasem	99,5%	Digital	100%	100%	97%
9	Kabupaten	Kabupaten Klungkung	97,9%	Digital	97%	100%	100%
10	Kabupaten	Kabupaten Tabanan	93,6%	Digital	94%	100%	89%
11	Provinsi	Provinsi Nusa Tenggara Barat	67,7%	Maju	68%	0%	100%
12	Kota	Kota Bima	55,7%	Maju	51%	0%	100%
13	Kota	Kota Mataram	90,7%	Digital	87%	100%	100%
14	Kabupaten	Kabupaten Bima	41,1%	Berkembang	33%	0%	90%
15	Kabupaten	Kabupaten Dompu	56,7%	Maju	55%	0%	90%
16	Kabupaten	Kabupaten Lombok Barat	83,2%	Digital	86%	50%	91%
17	Kabupaten	Kabupaten Lombok Tengah	53,0%	Berkembang	44%	25%	100%
18	Kabupaten	Kabupaten Lombok Timur	45,1%	Berkembang	50%	0%	51%
19	Kabupaten	Kabupaten Lombok Utara	41,5%	Berkembang	33%	0%	91%
20	Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	57,3%	Maju	56%	0%	92%
21	Kabupaten	Kabupaten Sumbawa Barat	57,4%	Maju	63%	0%	68%
22	Provinsi	Provinsi Nusa Tenggara Timur	62,4%	Maju	75%	0%	50%
23	Kota	Kota Kupang	71,3%	Maju	73%	100%	50%
24	Kabupaten	Kabupaten Alor	69,5%	Maju	68%	25%	98%
25	Kabupaten	Kabupaten Belu	65,1%	Maju	68%	0%	88%
26	Kabupaten	Kabupaten Ende	58,3%	Maju	66%	25%	49%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
27	Kabupaten	Kabupaten Flores Timur	47,5%	Berkembang	57%	0%	39%
28	Kabupaten	Kabupaten Kupang	54,1%	Berkembang	50%	0%	96%
29	Kabupaten	Kabupaten Lembata	32,8%	Berkembang	36%	0%	38%
30	Kabupaten	Kabupaten Malaka	31,5%	Berkembang	34%	0%	40%
31	Kabupaten	Kabupaten Manggarai	41,9%	Berkembang	37%	100%	30%
32	Kabupaten	Kabupaten Manggarai Barat	84,9%	Digital	83%	75%	97%
33	Kabupaten	Kabupaten Manggarai Timur	16,1%	Inisiasi	11%	0%	42%
34	Kabupaten	Kabupaten Nagekeo	71,4%	Maju	80%	75%	41%
35	Kabupaten	Kabupaten Ngada	79,2%	Maju	74%	75%	99%
36	Kabupaten	Kabupaten Rote Ndao	61,3%	Maju	63%	75%	50%
37	Kabupaten	Kabupaten Sabu Raijua	21,7%	Berkembang	25%	25%	8%
38	Kabupaten	Kabupaten Sikka	75,5%	Maju	66%	100%	97%
39	Kabupaten	Kabupaten Sumba Barat	75,5%	Maju	69%	100%	88%
40	Kabupaten	Kabupaten Sumba Barat Daya	67,5%	Maju	63%	75%	80%
41	Kabupaten	Kabupaten Sumba Tengah	67,9%	Maju	75%	100%	28%
42	Kabupaten	Kabupaten Sumba Timur	79,8%	Maju	82%	75%	75%
43	Kabupaten	Kabupaten Timor Tengah Selatan	44,0%	Berkembang	45%	50%	38%
44	Kabupaten	Kabupaten Timor Tengah Utara	53,6%	Berkembang	63%	0%	49%
45	Provinsi	Provinsi Banten	73,8%	Maju	91%	0%	50%
46	Kota	Kota Cilegon	87,9%	Digital	97%	0%	100%
47	Kota	Kota Serang	90,0%	Digital	100%	0%	100%
48	Kota	Kota Tangerang	90,0%	Digital	100%	0%	100%
49	Kota	Kota Tangerang Selatan	87,9%	Digital	97%	0%	100%
50	Kabupaten	Kabupaten Lebak	89,8%	Digital	100%	0%	99%
51	Kabupaten	Kabupaten Pandeglang	88,4%	Digital	100%	0%	92%
52	Kabupaten	Kabupaten Serang	83,7%	Digital	91%	0%	100%
53	Kabupaten	Kabupaten Tangerang	90,0%	Digital	100%	0%	100%
54	Kota	Kota Cirebon	87,9%	Digital	97%	0%	100%
55	Kabupaten	Kabupaten Cirebon	78,3%	Maju	97%	0%	52%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
56	Kabupaten	Kabupaten Indramayu	84,2%	Digital	92%	0%	100%
57	Kabupaten	Kabupaten Kuningan	85,7%	Digital	97%	0%	89%
58	Kabupaten	Kabupaten Majalengka	87,9%	Digital	97%	0%	100%
59	Provinsi	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	98,4%	Digital	98%	100%	100%
60	Kota	Kota Yogyakarta	99,2%	Digital	99%	100%	100%
61	Kabupaten	Kabupaten Bantul	83,9%	Digital	94%	75%	52%
62	Kabupaten	Kabupaten Gunungkidul	80,4%	Digital	89%	75%	52%
63	Kabupaten	Kabupaten Kulon Progo	78,8%	Maju	95%	50%	37%
64	Kabupaten	Kabupaten Sleman	97,5%	Digital	100%	75%	100%
65	Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	92,5%	Digital	100%	25%	100%
66	Provinsi	Provinsi Jawa Barat	88,2%	Digital	95%	25%	95%
67	Kota	Kota Bandung	87,9%	Digital	97%	0%	100%
68	Kota	Kota Bekasi	87,9%	Digital	97%	0%	100%
69	Kota	Kota Bogor	89,4%	Digital	99%	0%	100%
70	Kota	Kota Cimahi	83,7%	Digital	91%	0%	100%
71	Kota	Kota Depok	85,8%	Digital	94%	0%	100%
72	Kota	Kota Sukabumi	79,9%	Maju	82%	25%	100%
73	Kabupaten	Kabupaten Bandung	85,8%	Digital	94%	0%	100%
74	Kabupaten	Kabupaten Bandung Barat	90,0%	Digital	100%	0%	100%
75	Kabupaten	Kabupaten Bekasi	87,9%	Digital	97%	0%	100%
76	Kabupaten	Kabupaten Bogor	76,5%	Maju	83%	0%	92%
78	Kabupaten	Kabupaten Cianjur	80,2%	Digital	88%	0%	94%
154	Kabupaten	Kabupaten Garut	85,1%	Digital	94%	0%	96%
79	Kabupaten	Kabupaten Karawang	90,0%	Digital	100%	0%	100%
80	Kabupaten	Kabupaten Purwakarta	85,6%	Digital	97%	0%	88%
81	Kabupaten	Kabupaten Subang	77,7%	Maju	96%	0%	52%
82	Kabupaten	Kabupaten Sukabumi	87,3%	Digital	97%	0%	97%
83	Kabupaten	Kabupaten Sumedang	88,8%	Digital	100%	0%	94%
84	Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	84,6%	Digital	94%	0%	94%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
85	Kota	Kota Magelang	81,5%	Digital	94%	50%	52%
86	Kota	Kota Salatiga	95,0%	Digital	100%	50%	100%
87	Kota	Kota Semarang	90,8%	Digital	98%	25%	99%
88	Kabupaten	Kabupaten Blora	88,9%	Digital	98%	0%	100%
89	Kabupaten	Kabupaten Demak	94,7%	Digital	96%	75%	100%
90	Kabupaten	Kabupaten Grobogan	68,2%	Maju	83%	0%	50%
91	Kabupaten	Kabupaten Jepara	83,3%	Digital	97%	50%	52%
92	Kabupaten	Kabupaten Kebumen	82,1%	Digital	89%	0%	99%
93	Kabupaten	Kabupaten Kendal	88,2%	Digital	94%	25%	99%
94	Kabupaten	Kabupaten Kudus	92,3%	Digital	100%	25%	99%
95	Kabupaten	Kabupaten Magelang	81,2%	Digital	84%	25%	100%
96	Kabupaten	Kabupaten Pati	84,2%	Digital	92%	0%	99%
97	Kabupaten	Kabupaten Purworejo	89,2%	Digital	96%	25%	97%
98	Kabupaten	Kabupaten Rembang	85,7%	Digital	88%	50%	96%
99	Kabupaten	Kabupaten Semarang	80,1%	Digital	93%	50%	51%
100	Kabupaten	Kabupaten Temanggung	71,8%	Maju	89%	0%	49%
101	Kabupaten	Kabupaten Wonosobo	81,9%	Digital	88%	0%	100%
102	Provinsi	Provinsi Jawa Timur	90,0%	Digital	100%	0%	100%
103	Kota	Kota Mojokerto	77,8%	Maju	99%	0%	44%
104	Kota	Kota Surabaya	94,3%	Digital	95%	75%	100%
105	Kabupaten	Kabupaten Bangkalan	58,8%	Maju	80%	0%	15%
106	Kabupaten	Kabupaten Bojonegoro	89,4%	Digital	100%	0%	97%
107	Kabupaten	Kabupaten Gresik	80,8%	Digital	97%	25%	52%
108	Kabupaten	Kabupaten Jombang	80,0%	Digital	86%	0%	100%
109	Kabupaten	Kabupaten Lamongan	87,9%	Digital	97%	0%	100%
110	Kabupaten	Kabupaten Mojokerto	86,6%	Digital	97%	0%	94%
111	Kabupaten	Kabupaten Pamekasan	74,9%	Maju	72%	50%	99%
112	Kabupaten	Kabupaten Sampang	83,5%	Digital	91%	0%	99%
113	Kabupaten	Kabupaten Sidoarjo	97,1%	Digital	96%	100%	99%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
114	Kabupaten	Kabupaten Sumenep	83,2%	Digital	84%	50%	97%
115	Kabupaten	Kabupaten Tuban	85,8%	Digital	95%	0%	96%
116	Kabupaten	Kabupaten Banyuwangi	96,9%	Digital	97%	100%	95%
117	Kabupaten	Kabupaten Bondowoso	81,4%	Digital	88%	0%	100%
118	Kabupaten	Kabupaten Jember	63,4%	Maju	83%	0%	28%
119	Kabupaten	Kabupaten Lumajang	67,4%	Maju	71%	75%	52%
120	Kabupaten	Kabupaten Situbondo	72,4%	Maju	90%	0%	47%
121	Kota	Kota Blitar	71,4%	Maju	94%	0%	28%
122	Kota	Kota Kediri	93,8%	Digital	95%	75%	99%
123	Kota	Kota Madiun	61,5%	Maju	73%	0%	52%
124	Kabupaten	Kabupaten Blitar	72,9%	Maju	76%	0%	100%
125	Kabupaten	Kabupaten Kediri	75,4%	Maju	96%	50%	16%
126	Kabupaten	Kabupaten Madiun	54,6%	Berkembang	51%	0%	94%
127	Kabupaten	Kabupaten Magetan	74,6%	Maju	78%	0%	100%
128	Kabupaten	Kabupaten Nganjuk	60,4%	Maju	82%	0%	15%
129	Kabupaten	Kabupaten Ngawi	73,5%	Maju	97%	0%	28%
130	Kabupaten	Kabupaten Pacitan	61,8%	Maju	54%	50%	96%
131	Kabupaten	Kabupaten Ponorogo	81,6%	Digital	90%	0%	95%
132	Kabupaten	Kabupaten Trenggalek	71,6%	Maju	74%	0%	99%
133	Kabupaten	Kabupaten Tulungagung	79,1%	Maju	77%	50%	100%
134	Kota	Kota Batu	79,3%	Maju	85%	0%	100%
135	Kota	Kota Malang	86,9%	Digital	96%	0%	100%
136	Kota	Kota Pasuruan	75,2%	Maju	88%	100%	18%
137	Kota	Kota Probolinggo	67,1%	Maju	80%	25%	42%
138	Kabupaten	Kabupaten Malang	78,9%	Maju	80%	50%	89%
139	Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	90,0%	Digital	91%	75%	94%
140	Kabupaten	Kabupaten Probolinggo	78,3%	Maju	85%	0%	95%
141	Kabupaten	Kabupaten Banjarnegara	76,9%	Maju	82%	0%	98%
142	Kabupaten	Kabupaten Banyumas	87,6%	Digital	97%	0%	99%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
143	Kabupaten	Kabupaten Cilacap	74,5%	Maju	88%	25%	52%
144	Kabupaten	Kabupaten Purbalingga	76,7%	Maju	78%	25%	99%
145	Kota	Kota Surakarta	95,0%	Digital	100%	50%	100%
146	Kabupaten	Kabupaten Boyolali	78,5%	Maju	85%	0%	95%
147	Kabupaten	Kabupaten Karanganyar	93,4%	Digital	98%	50%	99%
148	Kabupaten	Kabupaten Klaten	81,2%	Digital	94%	50%	52%
149	Kabupaten	Kabupaten Sragen	91,6%	Digital	99%	25%	98%
150	Kabupaten	Kabupaten Sukoharjo	71,6%	Maju	80%	50%	52%
151	Kabupaten	Kabupaten Wonogiri	85,1%	Digital	94%	0%	97%
152	Kota	Kota Banjar	89,7%	Digital	100%	0%	99%
153	Kota	Kota Tasikmalaya	83,5%	Digital	91%	0%	100%
77	Kabupaten	Kabupaten Ciamis	90,0%	Digital	100%	0%	100%
155	Kabupaten	Kabupaten Pangandaran	78,4%	Maju	100%	0%	42%
156	Kabupaten	Kabupaten Tasikmalaya	76,5%	Maju	78%	25%	99%
157	Kota	Kota Pekalongan	91,6%	Digital	95%	50%	100%
158	Kota	Kota Tegal	82,3%	Digital	89%	0%	100%
159	Kabupaten	Kabupaten Batang	83,7%	Digital	91%	0%	100%
160	Kabupaten	Kabupaten Brebes	68,9%	Maju	84%	0%	52%
161	Kabupaten	Kabupaten Pekalongan	58,9%	Maju	66%	25%	50%
162	Kabupaten	Kabupaten Pemalang	92,5%	Digital	100%	25%	100%
163	Kabupaten	Kabupaten Tegal	71,6%	Maju	71%	25%	97%
164	Kota	Kota Balikpapan	75,3%	Maju	89%	25%	52%
165	Kabupaten	Kabupaten Paser	77,4%	Maju	83%	0%	97%
166	Kabupaten	Kabupaten Penajam Paser Utara	80,9%	Digital	77%	75%	97%
167	Provinsi	Provinsi Kalimantan Barat	73,1%	Maju	80%	0%	87%
168	Kota	Kota Pontianak	73,6%	Maju	79%	0%	92%
169	Kota	Kota Singkawang	82,0%	Digital	86%	25%	98%
170	Kabupaten	Kabupaten Bengkayang	56,6%	Maju	56%	0%	88%
171	Kabupaten	Kabupaten Kapuas Hulu	57,4%	Maju	69%	0%	44%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
172	Kabupaten	Kabupaten Kayong Utara	57,2%	Maju	66%	25%	44%
173	Kabupaten	Kabupaten Ketapang	50,8%	Berkembang	62%	0%	39%
174	Kabupaten	Kabupaten Kubu Raya	87,0%	Digital	86%	75%	98%
175	Kabupaten	Kabupaten Landak	66,6%	Maju	80%	25%	41%
176	Kabupaten	Kabupaten Melawi	70,7%	Maju	71%	50%	81%
177	Kabupaten	Kabupaten Mempawah	81,1%	Digital	91%	0%	87%
178	Kabupaten	Kabupaten Sambas	69,1%	Maju	73%	0%	90%
179	Kabupaten	Kabupaten Sanggau	62,3%	Maju	63%	0%	91%
180	Kabupaten	Kabupaten Sekadau	74,0%	Maju	80%	100%	41%
181	Kabupaten	Kabupaten Sintang	63,7%	Maju	64%	0%	96%
182	Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	67,4%	Maju	81%	0%	52%
183	Kota	Kota Banjarbaru	64,2%	Maju	77%	0%	52%
184	Kota	Kota Banjarmasin	72,5%	Maju	89%	0%	52%
185	Kabupaten	Kabupaten Balangan	62,9%	Maju	62%	0%	99%
186	Kabupaten	Kabupaten Banjar	72,3%	Maju	77%	0%	92%
187	Kabupaten	Kabupaten Barito Kuala	74,8%	Maju	79%	0%	98%
188	Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	72,8%	Maju	75%	0%	100%
189	Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	63,3%	Maju	85%	0%	18%
190	Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Utara	82,5%	Digital	88%	25%	92%
191	Kabupaten	Kabupaten Kotabaru	80,7%	Digital	88%	0%	95%
192	Kabupaten	Kabupaten Tabalong	71,7%	Maju	74%	0%	99%
193	Kabupaten	Kabupaten Tanah Bumbu	83,5%	Digital	91%	0%	99%
194	Kabupaten	Kabupaten Tanah Laut	73,3%	Maju	80%	0%	88%
195	Kabupaten	Kabupaten Tapin	62,4%	Maju	50%	75%	99%
196	Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	60,7%	Maju	61%	0%	90%
197	Kota	Kota Palangkaraya	50,5%	Berkembang	66%	0%	20%
198	Kabupaten	Kabupaten Barito Selatan	62,4%	Maju	49%	100%	90%
199	Kabupaten	Kabupaten Barito Timur	75,8%	Maju	82%	0%	92%
200	Kabupaten	Kabupaten Barito Utara	60,4%	Maju	64%	0%	78%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
201	Kabupaten	Kabupaten Gunung Mas	7,4%	Inisiasi	6%	0%	18%
202	Kabupaten	Kabupaten Kapuas	25,5%	Berkembang	27%	0%	34%
203	Kabupaten	Kabupaten Katingan	28,3%	Berkembang	34%	0%	22%
204	Kabupaten	Kabupaten Kotawaringin Barat	58,6%	Maju	69%	0%	51%
205	Kabupaten	Kabupaten Kotawaringin Timur	57,3%	Maju	63%	50%	41%
206	Kabupaten	Kabupaten Lamandau	68,3%	Maju	86%	0%	42%
207	Kabupaten	Kabupaten Murung Raya	60,9%	Maju	81%	0%	21%
208	Kabupaten	Kabupaten Pulang Pisau	56,1%	Maju	68%	0%	41%
209	Kabupaten	Kabupaten Seruyan	29,0%	Berkembang	33%	0%	29%
210	Kabupaten	Kabupaten Sukamara	70,6%	Maju	78%	0%	81%
211	Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	89,3%	Digital	100%	0%	97%
212	Kota	Kota Bontang	81,6%	Digital	88%	0%	100%
213	Kota	Kota Samarinda	91,6%	Digital	95%	50%	100%
214	Kabupaten	Kabupaten Berau	61,5%	Maju	74%	50%	24%
215	Kabupaten	Kabupaten Kutai Barat	75,0%	Maju	97%	25%	23%
216	Kabupaten	Kabupaten Kutai Kartanegara	87,9%	Digital	97%	0%	100%
217	Kabupaten	Kabupaten Kutai Timur	91,1%	Digital	92%	75%	97%
218	Kabupaten	Kabupaten Mahakam Ulu	43,7%	Berkembang	54%	25%	17%
219	Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara	87,7%	Digital	97%	0%	99%
220	Kota	Kota Tarakan	87,5%	Digital	93%	25%	100%
221	Kabupaten	Kabupaten Bulungan	73,2%	Maju	77%	0%	97%
222	Kabupaten	Kabupaten Malinau	72,7%	Maju	80%	0%	85%
223	Kabupaten	Kabupaten Nunukan	69,6%	Maju	86%	0%	48%
224	Kabupaten	Kabupaten Tana Tidung	46,5%	Berkembang	58%	0%	28%
225	Provinsi	Provinsi Gorontalo	79,8%	Maju	86%	0%	99%
226	Kota	Kota Gorontalo	91,3%	Digital	95%	50%	100%
227	Kabupaten	Kabupaten Boalemo	48,6%	Berkembang	65%	0%	16%
228	Kabupaten	Kabupaten Bone Bolango	93,7%	Digital	91%	100%	100%
229	Kabupaten	Kabupaten Gorontalo	74,7%	Maju	78%	0%	100%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
230	Kabupaten	Kabupaten Gorontalo Utara	73,8%	Maju	80%	0%	90%
231	Kabupaten	Kabupaten Pohuwato	76,0%	Maju	80%	25%	88%
232	Provinsi	Provinsi Maluku	32,2%	Berkembang	41%	0%	18%
233	Kota	Kota Ambon	35,0%	Berkembang	41%	25%	20%
234	Kota	Kota Tual	30,8%	Berkembang	36%	25%	15%
235	Kabupaten	Kabupaten Buru	17,7%	Inisiasi	24%	0%	6%
236	Kabupaten	Kabupaten Buru Selatan	14,2%	Inisiasi	8%	75%	5%
237	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Aru	5,9%	Inisiasi	7%	0%	6%
238	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	47,6%	Berkembang	56%	75%	3%
239	Kabupaten	Kabupaten Maluku Barat Daya	44,9%	Berkembang	60%	0%	14%
240	Kabupaten	Kabupaten Maluku Tengah	21,7%	Berkembang	29%	0%	6%
241	Kabupaten	Kabupaten Maluku Tenggara	50,9%	Berkembang	58%	0%	52%
242	Kabupaten	Kabupaten Seram Bagian Barat	23,5%	Berkembang	28%	0%	18%
243	Kabupaten	Kabupaten Seram Bagian Timur	7,3%	Inisiasi	8%	0%	10%
244	Provinsi	Provinsi Maluku Utara	75,8%	Maju	80%	0%	100%
245	Kota	Kota Ternate	55,1%	Maju	71%	0%	28%
246	Kota	Kota Tidore Kepulauan	38,2%	Berkembang	29%	0%	90%
247	Kabupaten	Kabupaten Halmahera Barat	29,8%	Berkembang	39%	0%	14%
248	Kabupaten	Kabupaten Halmahera Selatan	48,0%	Berkembang	58%	50%	14%
249	Kabupaten	Kabupaten Halmahera Tengah	38,3%	Berkembang	52%	0%	10%
250	Kabupaten	Kabupaten Halmahera Timur	48,0%	Berkembang	66%	0%	8%
251	Kabupaten	Kabupaten Halmahera Utara	65,8%	Maju	73%	0%	74%
252	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Sula	42,3%	Berkembang	29%	25%	96%
253	Kabupaten	Kabupaten Pulau Morotai	46,8%	Berkembang	59%	0%	29%
254	Kabupaten	Kabupaten Pulau Taliabu	21,9%	Berkembang	30%	0%	5%
255	Provinsi	Provinsi Papua	61,0%	Maju	60%	0%	95%
256	Kota	Kota Jayapura	78,5%	Maju	84%	0%	98%
257	Kabupaten	Kabupaten Asmat	61,7%	Maju	64%	0%	85%
258	Kabupaten	Kabupaten Biak Numfor	61,2%	Maju	60%	0%	96%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
259	Kabupaten	Kabupaten Boven Digoel	55,0%	Berkembang	51%	0%	95%
260	Kabupaten	Kabupaten Deiyai	23,8%	Berkembang	31%	0%	11%
261	Kabupaten	Kabupaten Dogiyai	24,0%	Berkembang	31%	0%	12%
262	Kabupaten	Kabupaten Intan Jaya	25,7%	Berkembang	33%	0%	12%
263	Kabupaten	Kabupaten Jayapura	66,7%	Maju	57%	75%	95%
264	Kabupaten	Kabupaten Jayawijaya	47,2%	Berkembang	66%	0%	5%
265	Kabupaten	Kabupaten Keerom	61,3%	Maju	46%	100%	95%
266	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Yapen	48,2%	Berkembang	42%	0%	95%
267	Kabupaten	Kabupaten Lanny Jaya	1,0%	Inisiasi	0%	0%	5%
268	Kabupaten	Kabupaten Mamberamo Raya	22,2%	Berkembang	31%	0%	3%
269	Kabupaten	Kabupaten Mamberamo Tengah	22,2%	Berkembang	31%	0%	3%
270	Kabupaten	Kabupaten Mappi	42,8%	Berkembang	37%	0%	83%
271	Kabupaten	Kabupaten Merauke	75,3%	Maju	68%	75%	100%
272	Kabupaten	Kabupaten Mimika	47,0%	Berkembang	43%	0%	85%
273	Kabupaten	Kabupaten Nabire	83,3%	Digital	80%	100%	87%
274	Kabupaten	Kabupaten Nduga	22,2%	Berkembang	31%	0%	3%
275	Kabupaten	Kabupaten Paniai	38,3%	Berkembang	31%	0%	84%
276	Kabupaten	Kabupaten Pegunungan Bintang	43,0%	Berkembang	57%	0%	14%
277	Kabupaten	Kabupaten Puncak	22,2%	Berkembang	31%	0%	3%
278	Kabupaten	Kabupaten Puncak Jaya	29,7%	Berkembang	31%	75%	3%
279	Kabupaten	Kabupaten Sarmi	47,6%	Berkembang	43%	0%	87%
280	Kabupaten	Kabupaten Supiori	43,4%	Berkembang	37%	0%	88%
281	Kabupaten	Kabupaten Tolikara	27,0%	Berkembang	37%	0%	7%
282	Kabupaten	Kabupaten Waropen	38,8%	Berkembang	31%	0%	87%
283	Kabupaten	Kabupaten Yahukimo	27,0%	Berkembang	37%	0%	7%
284	Kabupaten	Kabupaten Yalimo	26,4%	Berkembang	37%	0%	3%
285	Provinsi	Provinsi Papua Barat	77,1%	Maju	83%	0%	96%
286	Kota	Kota Sorong	18,1%	Inisiasi	20%	0%	19%
287	Kabupaten	Kabupaten Fak Fak	30,1%	Berkembang	18%	0%	87%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
288	Kabupaten	Kabupaten Kaimana	63,9%	Maju	76%	0%	52%
290	Kabupaten	Kabupaten Manokwari	54,9%	Berkembang	73%	0%	19%
291	Kabupaten	Kabupaten Manokwari Selatan	39,8%	Berkembang	55%	0%	8%
292	Kabupaten	Kabupaten Maybrat	18,5%	Inisiasi	25%	0%	6%
293	Kabupaten	Kabupaten Pegunungan Arfak	14,6%	Inisiasi	20%	0%	3%
289	Kabupaten	Kabupaten Raja Ampat	58,9%	Maju	80%	0%	15%
294	Kabupaten	Kabupaten Sorong	33,5%	Berkembang	46%	0%	6%
295	Kabupaten	Kabupaten Sorong Selatan	2,3%	Inisiasi	1%	0%	9%
296	Kabupaten	Kabupaten Tambräu	50,9%	Berkembang	71%	0%	7%
297	Kabupaten	Kabupaten Teluk Bintuni	46,3%	Berkembang	61%	0%	19%
298	Kabupaten	Kabupaten Teluk Wondama	67,8%	Maju	82%	0%	52%
299	Provinsi	Provinsi Sulawesi Barat	83,3%	Digital	91%	0%	97%
300	Kabupaten	Kabupaten Majene	97,6%	Digital	97%	100%	98%
301	Kabupaten	Kabupaten Mamasa	86,0%	Digital	94%	0%	100%
302	Kabupaten	Kabupaten Mamuju	82,6%	Digital	91%	0%	94%
303	Kabupaten	Kabupaten Mamuju Tengah	86,7%	Digital	95%	25%	90%
304	Kabupaten	Kabupaten Mamuju Utara	91,5%	Digital	100%	25%	95%
305	Kabupaten	Kabupaten Polewali Mandar	94,8%	Digital	97%	75%	97%
306	Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan	91,4%	Digital	98%	25%	100%
307	Kota	Kota Makassar	78,2%	Maju	89%	75%	42%
308	Kota	Kota Palopo	81,1%	Digital	97%	50%	41%
309	Kota	Kota Parepare	86,2%	Digital	94%	25%	90%
310	Kabupaten	Kabupaten Bantaeng	71,9%	Maju	98%	0%	18%
311	Kabupaten	Kabupaten Barru	90,0%	Digital	97%	25%	98%
312	Kabupaten	Kabupaten Bone	74,1%	Maju	67%	75%	98%
313	Kabupaten	Kabupaten Bulukumba	88,1%	Digital	98%	0%	99%
314	Kabupaten	Kabupaten Enrekang	64,2%	Maju	84%	0%	28%
315	Kabupaten	Kabupaten Gowa	67,2%	Maju	78%	75%	26%
316	Kabupaten	Kabupaten Jeneponto	95,5%	Digital	97%	75%	99%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
317	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Selayar	82,2%	Digital	87%	25%	95%
318	Kabupaten	Kabupaten Luwu	86,5%	Digital	85%	75%	97%
319	Kabupaten	Kabupaten Luwu Timur	74,0%	Maju	90%	25%	44%
320	Kabupaten	Kabupaten Luwu Utara	82,7%	Digital	91%	100%	44%
321	Kabupaten	Kabupaten Maros	79,2%	Maju	95%	50%	40%
322	Kabupaten	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	69,0%	Maju	63%	50%	100%
323	Kabupaten	Kabupaten Pinrang	86,0%	Digital	84%	75%	99%
324	Kabupaten	Kabupaten Sidenreng Rappang	74,2%	Maju	97%	25%	19%
325	Kabupaten	Kabupaten Sinjai	73,3%	Maju	73%	25%	100%
326	Kabupaten	Kabupaten Soppeng	89,6%	Digital	89%	75%	100%
327	Kabupaten	Kabupaten Takalar	66,0%	Maju	86%	0%	28%
328	Kabupaten	Kabupaten Tana Toraja	53,2%	Berkembang	49%	25%	80%
329	Kabupaten	Kabupaten Toraja Utara	64,9%	Maju	83%	50%	10%
330	Kabupaten	Kabupaten Wajo	76,2%	Maju	78%	25%	96%
331	Provinsi	Provinsi Sulawesi Tengah	74,8%	Maju	79%	0%	98%
332	Kota	Kota Palu	63,4%	Maju	65%	0%	89%
333	Kabupaten	Kabupaten Banggai	48,1%	Berkembang	62%	0%	24%
334	Kabupaten	Kabupaten Banggai Kepulauan	25,4%	Berkembang	33%	0%	10%
335	Kabupaten	Kabupaten Banggai Laut	18,7%	Inisiasi	13%	75%	10%
336	Kabupaten	Kabupaten Buol	55,6%	Maju	72%	25%	15%
337	Kabupaten	Kabupaten Donggala	63,0%	Maju	73%	25%	47%
338	Kabupaten	Kabupaten Morowali	82,9%	Digital	83%	50%	100%
339	Kabupaten	Kabupaten Morowali Utara	52,0%	Berkembang	49%	0%	88%
340	Kabupaten	Kabupaten Parigi Moutong	50,4%	Berkembang	55%	0%	61%
341	Kabupaten	Kabupaten Poso	60,6%	Maju	60%	0%	92%
342	Kabupaten	Kabupaten Sigi	68,2%	Maju	69%	0%	99%
343	Kabupaten	Kabupaten Tojo Una Una	62,6%	Maju	76%	0%	47%
344	Kabupaten	Kabupaten Toli Toli	63,0%	Maju	73%	25%	47%
345	Provinsi	Provinsi Sulawesi Tenggara	63,0%	Maju	62%	0%	99%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
346	Kota	Kota Bau Bau	76,6%	Maju	81%	0%	99%
347	Kota	Kota Kendari	84,0%	Digital	85%	50%	99%
348	Kabupaten	Kabupaten Bombana	38,7%	Berkembang	52%	0%	10%
349	Kabupaten	Kabupaten Buton	53,6%	Berkembang	72%	0%	15%
350	Kabupaten	Kabupaten Buton Selatan	1,6%	Inisiasi	1%	0%	6%
351	Kabupaten	Kabupaten Buton Tengah	69,3%	Maju	71%	0%	99%
352	Kabupaten	Kabupaten Buton Utara	42,9%	Berkembang	36%	0%	88%
353	Kabupaten	Kabupaten Kolaka	48,1%	Berkembang	41%	0%	96%
354	Kabupaten	Kabupaten Kolaka Timur	43,4%	Berkembang	37%	0%	88%
355	Kabupaten	Kabupaten Kolaka Utara	69,0%	Maju	71%	0%	96%
356	Kabupaten	Kabupaten Konawe	73,0%	Maju	77%	0%	97%
357	Kabupaten	Kabupaten Konawe Kepulauan	55,1%	Maju	74%	0%	18%
358	Kabupaten	Kabupaten Konawe Selatan	52,4%	Berkembang	71%	0%	15%
359	Kabupaten	Kabupaten Konawe Utara	49,6%	Berkembang	43%	0%	98%
360	Kabupaten	Kabupaten Muna	46,3%	Berkembang	41%	0%	89%
361	Kabupaten	Kabupaten Muna Barat	40,5%	Berkembang	51%	0%	23%
362	Kabupaten	Kabupaten Wakatobi	51,5%	Berkembang	71%	0%	10%
363	Provinsi	Provinsi Sulawesi Utara	78,5%	Maju	84%	0%	100%
364	Kota	Kota Bitung	86,1%	Digital	99%	0%	84%
365	Kota	Kota Kotamobagu	87,4%	Digital	82%	100%	100%
366	Kota	Kota Manado	74,2%	Maju	73%	50%	90%
367	Kota	Kota Tomohon	76,7%	Maju	81%	0%	100%
368	Kabupaten	Kabupaten Bolaang Mongondow	58,4%	Maju	54%	25%	90%
369	Kabupaten	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	61,8%	Maju	64%	0%	86%
370	Kabupaten	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	53,3%	Berkembang	50%	0%	90%
371	Kabupaten	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	57,2%	Maju	58%	0%	82%
372	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Sangihe	63,5%	Maju	65%	0%	90%
373	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Talaud	71,4%	Maju	77%	0%	88%
374	Kabupaten	Kabupaten Minahasa	74,7%	Maju	80%	0%	92%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
375	Kabupaten	Kabupaten Minahasa Selatan	40,1%	Berkembang	55%	0%	9%
376	Kabupaten	Kabupaten Minahasa Tenggara	74,2%	Maju	80%	0%	92%
377	Kabupaten	Kabupaten Minahasa Utara	62,4%	Maju	66%	0%	80%
378	Kabupaten	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	77,4%	Maju	82%	0%	100%
379	Provinsi	Provinsi Aceh	73,4%	Maju	77%	0%	98%
380	Kota	Kota Banda Aceh	83,3%	Digital	80%	75%	100%
381	Kota	Kota Sabang	38,6%	Berkembang	53%	0%	9%
382	Kota	Kota Subulussalam	32,5%	Berkembang	30%	100%	8%
383	Kabupaten	Kabupaten Aceh Barat	61,4%	Maju	64%	100%	33%
384	Kabupaten	Kabupaten Aceh Barat Daya	48,5%	Berkembang	45%	100%	34%
385	Kabupaten	Kabupaten Aceh Besar	60,9%	Maju	58%	100%	52%
386	Kabupaten	Kabupaten Aceh Jaya	89,5%	Digital	88%	100%	90%
387	Kabupaten	Kabupaten Aceh Selatan	49,1%	Berkembang	61%	25%	19%
388	Kabupaten	Kabupaten Aceh Singkil	50,3%	Berkembang	48%	100%	33%
389	Kabupaten	Kabupaten Nagan Raya	91,4%	Digital	88%	100%	99%
390	Kabupaten	Kabupaten Pidie	56,0%	Maju	55%	75%	51%
391	Kabupaten	Kabupaten Pidie Jaya	45,4%	Berkembang	44%	75%	34%
392	Kabupaten	Kabupaten Simeulue	60,8%	Maju	82%	0%	17%
393	Provinsi	Provinsi Bengkulu	81,1%	Digital	88%	0%	97%
394	Kota	Kota Bengkulu	87,4%	Digital	92%	50%	91%
395	Kabupaten	Kabupaten Bengkulu Selatan	48,0%	Berkembang	47%	50%	52%
396	Kabupaten	Kabupaten Bengkulu Tengah	58,5%	Maju	71%	50%	20%
397	Kabupaten	Kabupaten Bengkulu Utara	71,6%	Maju	76%	0%	93%
398	Kabupaten	Kabupaten Kaur	69,4%	Maju	71%	0%	100%
399	Kabupaten	Kabupaten Kepahiang	66,7%	Maju	68%	0%	96%
400	Kabupaten	Kabupaten Lebong	37,6%	Berkembang	50%	0%	13%
401	Kabupaten	Kabupaten Muko Muko	83,8%	Digital	91%	0%	100%
402	Kabupaten	Kabupaten Rejang Lebong	85,6%	Digital	80%	100%	99%
403	Kabupaten	Kabupaten Seluma	63,8%	Maju	77%	50%	25%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
404	Provinsi	Provinsi Jambi	58,8%	Maju	72%	0%	42%
405	Kota	Kota Jambi	65,0%	Maju	64%	0%	100%
406	Kota	Kota Sungai Penuh	43,6%	Berkembang	34%	0%	100%
407	Kabupaten	Kabupaten Batanghari	45,6%	Berkembang	60%	0%	17%
408	Kabupaten	Kabupaten Bungo	58,8%	Maju	72%	0%	42%
409	Kabupaten	Kabupaten Kerinci	46,0%	Berkembang	50%	25%	42%
410	Kabupaten	Kabupaten Merangin	59,2%	Maju	72%	0%	44%
411	Kabupaten	Kabupaten Muaro Jambi	55,1%	Maju	71%	0%	28%
412	Kabupaten	Kabupaten Sarolangun	40,7%	Berkembang	52%	0%	20%
413	Kabupaten	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	72,0%	Maju	88%	0%	52%
414	Kabupaten	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53,1%	Berkembang	70%	0%	20%
415	Kabupaten	Kabupaten Tebo	69,8%	Maju	94%	0%	20%
416	Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82,2%	Digital	92%	0%	88%
417	Kota	Kota Pangkal Pinang	93,4%	Digital	100%	50%	92%
418	Kabupaten	Kabupaten Bangka	85,9%	Digital	86%	75%	92%
419	Kabupaten	Kabupaten Bangka Barat	91,2%	Digital	90%	100%	90%
420	Kabupaten	Kabupaten Bangka Selatan	63,4%	Maju	49%	100%	96%
421	Kabupaten	Kabupaten Bangka Tengah	79,9%	Maju	96%	25%	51%
422	Kabupaten	Kabupaten Belitung	64,1%	Maju	66%	0%	89%
423	Kabupaten	Kabupaten Belitung Timur	58,4%	Maju	65%	75%	28%
424	Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	72,5%	Maju	94%	0%	33%
425	Kota	Kota Batam	90,0%	Digital	100%	0%	100%
426	Kota	Kota Tanjung Pinang	87,3%	Digital	89%	50%	100%
427	Kabupaten	Kabupaten Bintan	73,7%	Maju	87%	25%	52%
429	Kabupaten	Kabupaten Karimun	87,9%	Digital	97%	0%	100%
428	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Anambas	78,3%	Maju	97%	0%	52%
430	Kabupaten	Kabupaten Lingga	66,5%	Maju	55%	100%	89%
431	Kabupaten	Kabupaten Natuna	71,6%	Maju	81%	50%	49%
432	Provinsi	Provinsi Lampung	80,7%	Digital	88%	0%	96%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
433	Kota	Kota Bandar Lampung	58,9%	Maju	58%	0%	92%
434	Kota	Kota Metro	64,9%	Maju	73%	50%	44%
435	Kabupaten	Kabupaten Lampung Barat	58,6%	Maju	57%	0%	95%
436	Kabupaten	Kabupaten Lampung Selatan	81,4%	Digital	82%	50%	95%
437	Kabupaten	Kabupaten Lampung Tengah	81,2%	Digital	88%	0%	98%
438	Kabupaten	Kabupaten Lampung Timur	56,8%	Maju	60%	50%	49%
439	Kabupaten	Kabupaten Lampung Utara	64,9%	Maju	74%	100%	16%
440	Kabupaten	Kabupaten Mesuji	73,5%	Maju	72%	50%	92%
441	Kabupaten	Kabupaten Pesawaran	48,2%	Berkembang	60%	0%	29%
442	Kabupaten	Kabupaten Pesisir Barat	29,8%	Berkembang	25%	100%	10%
443	Kabupaten	Kabupaten Pringsewu	80,3%	Digital	79%	50%	100%
444	Kabupaten	Kabupaten Tanggamus	82,4%	Digital	82%	50%	100%
445	Kabupaten	Kabupaten Tulang Bawang	84,5%	Digital	85%	50%	100%
446	Kabupaten	Kabupaten Tulang Bawang Barat	69,3%	Maju	71%	0%	99%
447	Kabupaten	Kabupaten Way Kanan	79,0%	Maju	85%	0%	98%
448	Kota	Kota Langsa	51,0%	Berkembang	35%	100%	82%
449	Kota	Kota Lhokseumawe	75,0%	Maju	64%	100%	100%
450	Kabupaten	Kabupaten Aceh Tamiang	59,1%	Maju	65%	50%	44%
451	Kabupaten	Kabupaten Aceh Tengah	74,7%	Maju	71%	75%	88%
452	Kabupaten	Kabupaten Aceh Tenggara	67,7%	Maju	57%	100%	88%
453	Kabupaten	Kabupaten Aceh Timur	82,6%	Digital	75%	100%	99%
454	Kabupaten	Kabupaten Aceh Utara	86,9%	Digital	82%	100%	98%
455	Kabupaten	Kabupaten Bener Meriah	67,8%	Maju	72%	0%	87%
456	Kabupaten	Kabupaten Bireuen	69,4%	Maju	60%	100%	89%
457	Kabupaten	Kabupaten Gayo Lues	63,3%	Maju	58%	50%	88%
458	Kota	Kota Pematangsiantar	97,5%	Digital	100%	75%	100%
459	Kota	Kota Tanjung Balai	98,4%	Digital	98%	100%	100%
460	Kabupaten	Kabupaten Asahan	82,0%	Digital	89%	0%	99%
461	Kabupaten	Kabupaten Batu Bara	87,9%	Digital	97%	0%	100%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
462	Kabupaten	Kabupaten Labuhanbatu	79,9%	Maju	88%	0%	92%
463	Kabupaten	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	71,5%	Maju	77%	0%	89%
464	Kabupaten	Kabupaten Labuhanbatu Utara	77,7%	Maju	86%	0%	89%
465	Kabupaten	Kabupaten Simalungun	76,3%	Maju	81%	0%	99%
466	Provinsi	Provinsi Riau	88,4%	Digital	98%	0%	100%
467	Kota	Kota Dumai	89,4%	Digital	85%	100%	99%
468	Kota	Kota Pekanbaru	90,0%	Digital	100%	0%	100%
469	Kabupaten	Kabupaten Bengkalis	96,8%	Digital	98%	100%	92%
470	Kabupaten	Kabupaten Indragiri Hilir	90,2%	Digital	100%	100%	51%
471	Kabupaten	Kabupaten Indragiri Hulu	94,9%	Digital	97%	75%	98%
472	Kabupaten	Kabupaten Kampar	88,6%	Digital	98%	0%	100%
473	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Meranti	53,2%	Berkembang	51%	75%	49%
474	Kabupaten	Kabupaten Kuantan Singingi	97,0%	Digital	100%	75%	98%
475	Kabupaten	Kabupaten Pelalawan	86,8%	Digital	95%	100%	50%
476	Kabupaten	Kabupaten Rokan Hilir	96,7%	Digital	100%	75%	96%
477	Kabupaten	Kabupaten Rokan Hulu	85,5%	Digital	94%	0%	99%
478	Kabupaten	Kabupaten Siak	78,7%	Maju	98%	0%	50%
479	Kota	Kota Gunungsitoli	59,5%	Maju	59%	0%	92%
480	Kota	Kota Padangsidimpuan	87,5%	Digital	86%	75%	100%
481	Kota	Kota Sibolga	74,9%	Maju	78%	0%	100%
482	Kabupaten	Kabupaten Humbang Hasundutan	67,0%	Maju	68%	0%	98%
483	Kabupaten	Kabupaten Mandailing Natal	77,2%	Maju	84%	0%	92%
484	Kabupaten	Kabupaten Nias	39,5%	Berkembang	49%	0%	26%
485	Kabupaten	Kabupaten Nias Barat	18,1%	Inisiasi	10%	100%	7%
486	Kabupaten	Kabupaten Nias Selatan	60,8%	Maju	61%	0%	90%
487	Kabupaten	Kabupaten Nias Utara	59,8%	Maju	80%	0%	20%
488	Kabupaten	Kabupaten Padang Lawas	80,5%	Digital	88%	25%	82%
489	Kabupaten	Kabupaten Padang Lawas Utara	88,1%	Digital	88%	75%	95%
490	Kabupaten	Kabupaten Samosir	70,4%	Maju	74%	0%	93%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
			Score	Tahap	Score	Score	Score
491	Kabupaten	Kabupaten Tapanuli Selatan	95,3%	Digital	94%	100%	98%
492	Kabupaten	Kabupaten Tapanuli Tengah	79,0%	Maju	71%	100%	98%
493	Kabupaten	Kabupaten Tapanuli Utara	83,7%	Digital	80%	75%	100%
494	Kabupaten	Kabupaten Toba Samosir	89,1%	Digital	88%	75%	100%
495	Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	84,6%	Digital	89%	25%	100%
496	Kota	Kota Bukittinggi	82,2%	Digital	78%	75%	100%
497	Kota	Kota Padang	71,3%	Maju	79%	75%	42%
498	Kota	Kota Padang Panjang	65,6%	Maju	84%	0%	34%
499	Kota	Kota Pariaman	58,7%	Maju	56%	0%	98%
500	Kota	Kota Payakumbuh	85,8%	Digital	94%	0%	100%
501	Kota	Kota Sawahlunto	78,3%	Maju	73%	75%	97%
502	Kota	Kota Solok	69,7%	Maju	71%	0%	100%
503	Kabupaten	Kabupaten Agam	69,2%	Maju	73%	0%	89%
504	Kabupaten	Kabupaten Dharmasraya	88,2%	Digital	84%	100%	98%
505	Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Mentawai	85,1%	Digital	85%	100%	78%
506	Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	61,8%	Maju	60%	0%	100%
507	Kabupaten	Kabupaten Padang Pariaman	65,7%	Maju	65%	0%	100%
508	Kabupaten	Kabupaten Pasaman	60,5%	Maju	61%	0%	88%
509	Kabupaten	Kabupaten Pasaman Barat	83,9%	Digital	88%	25%	99%
510	Kabupaten	Kabupaten Pesisir Selatan	79,5%	Maju	86%	0%	97%
511	Kabupaten	Kabupaten Sijunjung	77,7%	Maju	78%	50%	90%
512	Kabupaten	Kabupaten Solok	73,7%	Maju	80%	0%	90%
513	Kabupaten	Kabupaten Solok Selatan	71,7%	Maju	83%	50%	42%
514	Kabupaten	Kabupaten Tanah Datar	81,2%	Digital	79%	75%	92%
515	Provinsi	Provinsi Sumatera Selatan	86,2%	Digital	89%	50%	95%
516	Kota	Kota Lubuklinggau	73,2%	Maju	73%	50%	86%
517	Kota	Kota Pagar Alam	56,3%	Maju	68%	75%	8%
518	Kota	Kota Palembang	79,6%	Maju	94%	50%	44%
519	Kota	Kota Prabumulih	67,6%	Maju	72%	0%	87%

No	Pemerintah Daerah		Indeks ETPD		Aspek Implementasi (70%)	Aspek Realisasi (10%)	Aspek Lingkungan Strategis (20%)
	Tingkat	Nama					
Score	Tahap	Score	Score	Score	Score	Score	
520	Kabupaten	Kabupaten Banyuasin	78,3%	Maju	80%	25%	100%
521	Kabupaten	Kabupaten Empat Lawang	80,8%	Digital	77%	100%	85%
522	Kabupaten	Kabupaten Lahat	81,3%	Digital	82%	50%	95%
523	Kabupaten	Kabupaten Muara Enim	60,8%	Maju	80%	0%	25%
524	Kabupaten	Kabupaten Musi Banyuasin	74,9%	Maju	78%	0%	100%
525	Kabupaten	Kabupaten Musi Rawas	73,2%	Maju	77%	0%	95%
526	Kabupaten	Kabupaten Musi Rawas Utara	47,5%	Berkembang	63%	0%	16%
527	Kabupaten	Kabupaten Ogan Ilir	58,2%	Maju	70%	75%	10%
528	Kabupaten	Kabupaten Ogan Komering Ilir	51,3%	Berkembang	61%	0%	43%
529	Kabupaten	Kabupaten Ogan Komering Ulu	75,9%	Maju	74%	50%	96%
530	Kabupaten	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	64,8%	Maju	86%	0%	24%
531	Kabupaten	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	74,8%	Maju	86%	100%	24%
532	Kabupaten	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	57,8%	Maju	54%	0%	100%
533	Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	77,4%	Maju	82%	0%	100%
534	Kota	Kota Binjai	91,4%	Digital	88%	100%	99%
535	Kota	Kota Medan	88,3%	Digital	89%	75%	92%
536	Kota	Kota Tebing Tinggi	97,9%	Digital	97%	100%	100%
537	Kabupaten	Kabupaten Dairi	92,9%	Digital	97%	50%	100%
538	Kabupaten	Kabupaten Deli Serdang	74,0%	Maju	98%	0%	28%
539	Kabupaten	Kabupaten Karo	82,1%	Digital	91%	0%	92%
540	Kabupaten	Kabupaten Langkat	81,6%	Digital	88%	0%	100%
541	Kabupaten	Kabupaten Pakpak Bharat	81,6%	Digital	88%	0%	100%
542	Kabupaten	Kabupaten Serdang Bedagai	87,0%	Digital	97%	0%	96%

# **TIM PENYUSUN**

## **Penasihat:**

Rahmat Hernowo

A. Donanto H.W.

## **Koordinator:**

Sithowati Sandrarini

## **Ketua Tim Penyusun:**

Duddy Adiyatna

## **Tim Penyusun:**

Freddy Firmansyah

Meita Elshinta Siagian

Novan Permana

Rully Farel

Choirunnisa Rifa Juliani

Jonatan Kristian Muda

Priskila Teresa Nandita

## **Kontributor:**

542 Pemerintah Daerah

46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia